

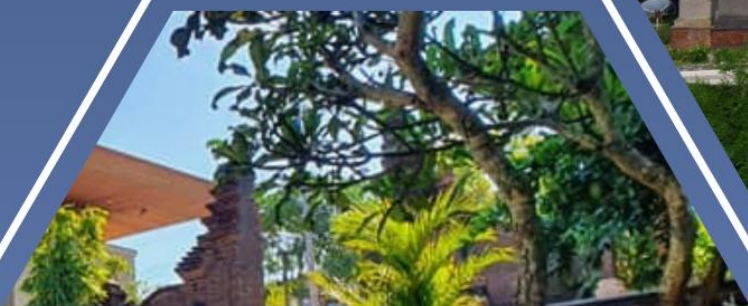
wonderful  
indonesia



# PEDOMAN

## PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
**2024**



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    LANDASAN HUKUM .....	5
<b>BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	<b>6</b>
2.1    RASIONALISASI .....	6
2.2    KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
2.3    TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	9
2.4    PENILAIAN.....	19
<b>BAB III PROGRAM PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1    SKEMA PENELITIAN DASAR (PD).....	21
A.    PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP) SKEMA ARTIKEL ILMIAH	21
B.    PENELITIAN KERJASAMA (PK).....	21
C.    PENELITIAN PRODUK VOKASI SKEMA PATEN SEDERHANA ...	22
D.    SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN .....	23
<b>BAB IV PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	<b>25</b>
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMULA (PMP) .....	26
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM).....	26
SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PBK).....	28
1.1    Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM) .....	28
1.2    Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah.....	29
1.3    Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) .....	32
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>41</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jadwal Tentatif Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekpar Bali .....	11
Gambar 3. 1 Skema Penelitian di Poltekpar Bali .....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Skema, Syarat Tim Pelaksana, Lama Usulan, Dan Beserta Pendanaan Program Penelitian di Poltekpar Bali .....	12
Tabel 2. 2 Ringkasan Skema, Syarat Tim Pelaksana, Lama Usulan, Dan Beserta Pendanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekpar Bali .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penelitian memiliki peran fundamental dalam mengakselerasi kemajuan kepariwisataan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai Pendidikan vokasional dengan spesialisasi bidang kepariwisataan dan hospitalitas pertama di Bali, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, mengemban tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi, tetapi juga dalam menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi dari tridharma perguruan tinggi, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.

Fokus penelitian di Poltekpar Bali diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup kepariwisataan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas serta memperkuat daya saing industri pariwisata. Orientasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46, yang menekankan pentingnya penelitian dalam:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. Peningkatan mutu PT dan kemajuan peradaban bangsa;
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi turut menegaskan kewajiban Poltekpar Bali dalam menyelenggarakan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, serta fungsi vitalnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk keperluan tersebut. Lebih lanjut, institusi ini diharapkan untuk memainkan peran strategis dalam memperkuat kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aset investasi dalam pembangunan kepariwisataan jangka panjang.

Dalam konteks pendidikan tinggi vokasional, Poltekpar Bali diharapkan untuk mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, serta menghasilkan lulusan yang terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan mereka. Ini termasuk pendekatan pembelajaran yang berbasis *teaching factory/industry*, yang mendukung penelitian yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain itu, tujuan penelitian di Poltekpar Bali harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023, mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta peningkatan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat nasional dan internasional. Standar penelitian yang diadopsi harus mencerminkan strategi,

arah kebijakan, program, dan pelaksanaan yang sesuai dengan misi Poltekpar Bali dalam mendukung tridharma perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menetapkan peran penting Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Institusi ini memiliki tanggung jawab krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk penyelenggaraan IPTEK, serta dalam meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih jauh, Poltekpar Bali memegang peran strategis dalam menguatkan posisi IPTEK sebagai aset investasi yang vital untuk pembangunan nasional di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Dalam konteks pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dan memfasilitasi produksi inovasi dan inovasi yang dapat memicu hilirisasi teknologi yang relevan dan tepat guna. Ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan produksi serta penggunaan komponen lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan tinggi vokasi, yaitu menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemampuan penalaran kritis melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian terapan spesifik.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 42, mengamanatkan Poltekpar Bali untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat luas, sektor bisnis, dan industri. Melalui pendekatan ini, Poltekpar Bali diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam membangun ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, meningkatkan inovasi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Poltekpar Bali dianjurkan untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang berbasis *teaching factory* atau *teaching industry*. Model ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang langsung terkait dengan praktik industri, sehingga memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka dengan pengalaman nyata. Model pembelajaran semacam ini tidak hanya mendukung program penelitian yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder industri pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa lulusan Poltekpar Bali siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja, dengan keterampilan yang telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang.

Dengan fokus pada pendekatan yang terintegrasi antara teori dan praktek, serta penekanan pada inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan, Poltekpar Bali berada dalam posisi strategis untuk memimpin transformasi industri pariwisata Indonesia menuju era baru yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Melalui implementasi tridharma perguruan tinggi yang efektif, Poltekpar Bali tidak hanya membekali mahasiswanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyumbang pada pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mengurangi

ketergantungan terhadap impor melalui inovasi dan hilirisasi teknologi.

Secara umum tujuan penelitian di Poltekpar Bali yaitu dapat:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan penelitian unggulan sesuai kapasitas sumber daya yang dimiliki;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
4. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Pemenuhan pengelolaan penelitian yang memenuhi standar mutu menjadi prioritas di Poltekpar Bali, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Standar ini dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilakukan tidak hanya mengikuti kaidah ilmiah, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi kemajuan kepariwisataan. Implementasi standar penelitian ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni standar luaran, proses, dan masukan penelitian, yang semuanya diarahkan untuk mendukung misi dan visi Poltekpar Bali dalam memajukan sektor pariwisata.

1. **Standar Luaran Penelitian:** Di Poltekpar Bali, kriteria untuk luaran penelitian menekankan pada mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang harus selaras dengan tujuan institusi dalam memajukan industri pariwisata. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyebarkan hasil penelitian yang tidak hanya memenuhi standar akademik tetapi juga dapat diaplikasikan dalam praktik industri pariwisata, melalui publikasi, seminar, pendaftaran hak kekayaan intelektual, atau media lainnya yang efektif untuk komunikasi ilmiah. Keterlibatan aktif dalam diseminasi ini menegaskan komitmen Poltekpar Bali terhadap peningkatan kualitas dan inovasi dalam sektor pariwisata.
2. **Standar Proses Penelitian:** Proses penelitian di Poltekpar Bali dirancang untuk mengedukasi mahasiswa sebagai intelektual yang mampu berkontribusi pada budaya penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pariwisata. Hal ini melibatkan penerapan kode etik penelitian, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan kerja sama penelitian yang sesuai dengan regulasi. Dosen, peneliti, dan mahasiswa berkolaborasi dalam penelitian, menerapkan metode ilmiah dan memanfaatkan otonomi akademik. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam proyek penelitian dapat memperoleh kredit semester, mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan ilmiah dan praktik penelitian yang sesungguhnya.
3. **Standar Masukan Penelitian:** Untuk mendukung kegiatan penelitian, Poltekpar Bali memastikan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan yang cukup, serta penugasan dan pengembangan kompetensi dosen untuk melaksanakan penelitian. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang efisien juga menjadi kunci dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan,

dan menyebarkan proses serta hasil penelitian, memungkinkan institusi untuk beroperasi secara efektif dan efisien dalam lingkup penelitian kepariwisataan.

Melalui penerapan standar-standar ini, Poltekpar Bali berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi penelitiannya, dengan tujuan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan. Komitmen terhadap peningkatan penelitian yang berkualitas tinggi ini mencerminkan dedikasi Poltekpar Bali dalam mempersiapkan pemenuhan SDM pariwisata yang inovatif dan responsif terhadap tantangan global serta kebutuhan industri pariwisata nasional dan internasional.

Lebih lanjut, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga merupakan pilar fundamental dari tridharma perguruan tinggi—sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan mengangkat kecerdasan kehidupan bangsa, dengan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan sektor pariwisata.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat oleh Poltekpar Bali mencakup:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri, guna memastikan relevansi dan efektivitas aktivitas dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata.
2. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pariwisata.
3. Penyediaan solusi berbasis kajian akademis untuk merespons kebutuhan, tantangan, atau masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pariwisata.
4. Realisasi kegiatan yang dapat menguatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dengan memanfaatkan potensi pariwisata.
5. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, Poltekpar Bali mengadopsi tiga standar utama:

1. **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat:** Standar ini mencakup pengembangan dan diseminasi hasil pengabdian yang berkualitas, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini termasuk inovasi teknologi tepat guna, materi pengembangan ilmu pengetahuan, atau modul pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata.
2. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:** Standar ini menekankan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian aktivitas pengabdian yang berkualitas. Poltekpar Bali menerapkan kode etik, pengelolaan hak kekayaan intelektual, kerjasama, dan kriteria diseminasi yang menjamin integritas dan akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



3. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat:** Ini berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini menjamin bahwa kegiatan pengabdian didukung oleh sumber daya yang memadai dan dapat dilaksanakan dengan efisiensi.

Melalui pengabdian kepada masyarakat Poltekpar Bali tidak hanya berkontribusi langsung pada pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan sektor ini. Kerjasama yang diperkuat dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, memperluas dampak dan jangkauan aktivitas pengabdian. Penggunaan sistem informasi dan komunikasi seperti SINERGI memungkinkan Poltekpar Bali untuk mengelola kegiatan penelitian dan PKM dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih baik, memastikan bahwa hasil-hasilnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Melalui pendekatan ini, Poltekpar Bali berusaha untuk tidak hanya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dalam konteks pariwisata tetapi juga mempromosikan pengembangan sektor ini secara berkelanjutan dan inklusif.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dan kebijakan yang melandasi kegiatan P3M Politeknik Pariwisata Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024
11. Renstra Poltekpar Bali
12. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekpar Bali
13. RIP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## **BAB II**

# **PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **2.1 RASIONALISASI**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali memiliki peran strategis dalam mengatur arah kebijakan dan standar operasional terkait dengan penjaminan mutu akademik dan institusional. Tanggung jawab utama P3M mencakup perumusan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, P3M berperan sebagai pusat yang memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan bagi komunitas akademik di lingkungan Poltekpar Bali.

Dalam konteks akademis, upaya P3M dalam mengawal dan mengelola penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Poltekpar Bali diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Penelitian: P3M berinisiatif untuk meningkatkan kualitas penelitian dengan mendorong penerapan metodologi penelitian yang inovatif dan relevan dengan tantangan industri pariwisata. Hal ini termasuk penguatan kapasitas riset dosen dan mahasiswa melalui workshop, pelatihan, dan kolaborasi riset dengan institusi lain yang memiliki keunggulan yang distingtif di bidang pariwisata.
2. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang Berdampak: P3M memainkan peran penting dalam menyelaraskan program pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ini mencakup pemberdayaan masyarakat lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan produk pariwisata, serta inisiatif pelestarian lingkungan dan budaya.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana: P3M berkoordinasi dengan bagian terkait pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk laboratorium, pusat data, dan fasilitas lain yang memungkinkan inovasi serta eksplorasi ilmiah.
4. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan: P3M berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional dosen serta tenaga kependidikan melalui program pengembangan berkelanjutan terutama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Penjaminan Mutu Akademik dan Kelembagaan: Melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, P3M bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dalam kerangka standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pariwisata.

Dalam menjalankan fungsinya, P3M Poltekpar Bali secara aktif menciptakan sinergi antara kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dan pengabdian dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan materi pembelajaran, sehingga meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian teoretis tetapi juga praktis dan siap berkontribusi pada industri pariwisata.

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, P3M Poltekpar Bali berupaya untuk memperkuat posisi lembaga sebagai pusat keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor pariwisata, sekaligus mendukung pencapaian visi Poltekpar Bali dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan responsif terhadap dinamika industri pariwisata global.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdayaan, P3M berupaya terus mengawal petian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekpar Bali. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekpar Bali diarahkan untuk:

1. Mendukung target capaian IKU Poltekpar Bali;
2. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekpar Bali;
3. Meningkatkan daya saing Poltekpar Bali di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
4. Meningkatkan angka partisipasi dosen dan pengajar melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekpar Bali;
6. Memfungsikan potensi Poltekpar Bali dalam menopang daya saing bangsa; dan
7. Mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

## **2.2 KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali dilakukan dengan mengacu pada kerangka standar penjaminan mutu yang ketat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permenristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam rangka memastikan kualitas dan relevansi kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan industri pariwisata dan masyarakat pada umumnya, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Poltekpar Bali telah menetapkan serangkaian ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh seluruh civitas dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Pariwisata yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK baik di bawah Kemendikbudristek atau di bawah kementerian lain, DUDI, pemerintah, dan/atau LSM baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Passport).
3. Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa (NIM).
4. Usulan dilakukan melalui SINERGI (<https://SINERGI.ppb.ac.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari UPPS tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
5. Setiap dosen hanya dapat menerima pendanaan dua usulan penelitian (dimana satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota) pada semester berjalan dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (dimana satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota) pada semester berjalan.
6. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimum dua kali sebagai ketua untuk skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada program penelitian.
7. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan masyarakat pemula dan/atau pemberdayaan kemitraan masyarakat.
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing- masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
9. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak akan mendapatkan pendanaan sebagai ketua pada tahun-tahun berikutnya sampai yang bersangkutan melunasi tanggungannya.
10. Pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran wajib dalam bentuk publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding sesuai dengan target skema, diberikan waktu hingga satu tahun setelah pelaksanaan pengabdian berakhir. Apabila masih tidak berhasil, akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru hingga luaran terpenuhi sesuai target;
11. Apabila pelaksanaan penelitian/pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali judul yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan penelitian/pengabdian yang sumber pendanaannya dari P3M selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
12. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 105 Tahun 2019 bahwa anggaran penelitian yang diterima oleh peneliti tidak dapat digunakan untuk belanja peralatan yang sifatnya investasi atau untuk belanja lain yang dari sisi pelaksanaan penelitian sangat diperlukan.
13. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

14. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama dan/atau korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah.
15. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam acknowledgement atau sumber dana.

### 2.3 TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh P3M melalui laman <https://p3m.ppb.ac.id/> dan/atau melalui media lain. Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1 dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

#### Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan program penelitian/pengabdian kepada masyarakat diawali dengan mengumumkan penerimaan usulan melalui laman <https://p3m.ppb.ac.id/>. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Buku panduan teknis pengusulan melalui SINERGI.

#### Tahap Pengusulan Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat

Pengusulan dilakukan oleh dosen/peneliti melalui sistem SINERGI. Dosen yang akan mengusulkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat wajib mempunyai akun di SINERGI. Pengusul menginput data usulan dan mengunggah proposal yang sudah menggunakan template proposal yang dapat diunduh dari sistem SINERGI setelah login. Alur tahapan pengusulan proposal penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1, sedangkan pengabdian pada Gambar 2.1. Format Substansi Proposal Penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 – Lampiran 3 dan template proposal pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 4 Usulan harus mendapatkan persetujuan (approval) oleh KaP3M dan Ketua Jurusan. Persetujuan diberikan oleh KaP3M melalui sistem SINERGI. Untuk itu Ketua Jurusan diharapkan melakukan screening terhadap proposal yang diajukan oleh dosen di jurusannya sebelum memberikan persetujuan.

#### Tahap Penyeleksian

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh P3M. P3M akan menugaskan reviewer untuk melakukan seleksi melalui sistem SINERGI. Secara umum seleksi proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

1. **Seleksi Administrasi**, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
2. **Seleksi Substansi**, dilakukan untuk menilai substansi penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan.

### **Tahap Penetapan**

1. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh P3M dengan mempertimbangkan hasil seleksi.
2. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan P3M dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
3. Hasil penetapan akan diinformasikan melalui SINERGI dan/atau melalui media lain.
4. Pengusul yang proposalnya ditetapkan untuk didanai, melakukan perbaikan proposal sesuai rekomendasi P3Mi dan/atau Reviewer.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan Program Penelitian/pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. Pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pembuatan SK oleh P3M
2. Pencairan dana program penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
3. Revisi proposal dan RAB mengacu P3M dan PPK;
4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB pendanaan.

### **Tahap Pelaporan**

Peneliti/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

#### **Penelitian**

1. Ketua tim peneliti wajib menyampaikan laporan akhir dan luaran penelitian. Pengusul juga harus mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sesuai format yang telah ditentukan;
2. Laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100%. Format laporan akhir penelitian dapat dilihat pada Lampiran 5;
3. Laporan akhir pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program pada skema pendanaan Penelitian di lingkungan Poltekpar Bali

#### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Ketua tim PKM wajib menyampaikan laporan akhir dan luaran penelitian. Pengusul juga harus mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sesuai format yang telah ditentukan;
2. Laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100%. Format laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 6;
3. Laporan akhir pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program pada skema pendanaan Penelitian di lingkungan Poltekpar Bali

### **Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi**

Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pemantauan program penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada laporan akhir yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi secara internal dan hasilnya dilaporkan kepada P3M. Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

1. P3M menugaskan reviewer untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk setiap

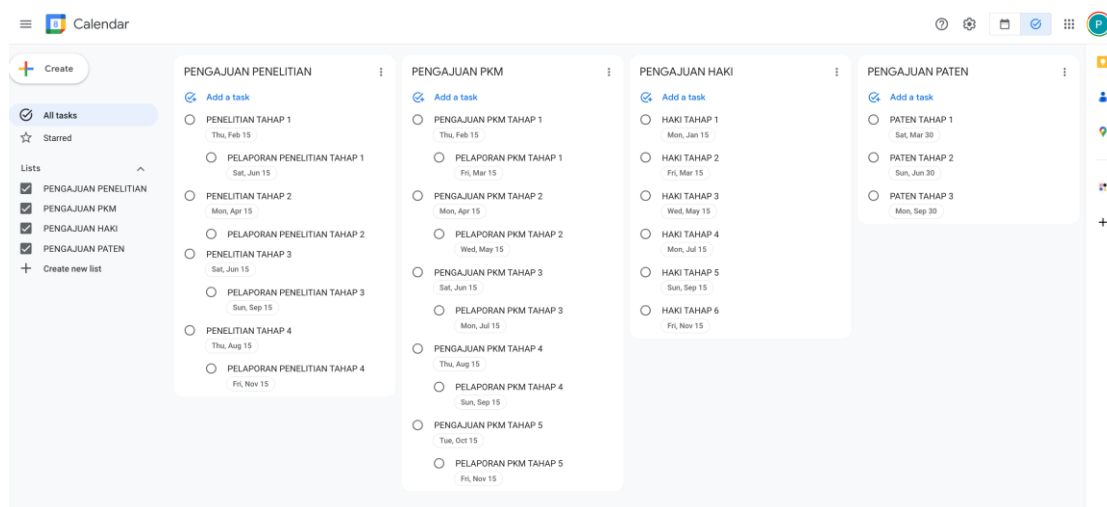
- judul penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh P3M.
2. Monitoring dan evaluasi oleh P3M dapat dilakukan oleh reviewer internal dan/atau reviewer eksternal.
  3. Reviewer internal perguruan tinggi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan memperhatikan ketentuan reviewer yang ditetapkan oleh P3M.
  4. Reviewer eksternal adalah reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan Poltekpar Bali atas rekomendasi P3M
  5. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Poltekpar Bali

### Tahap Penilaian Hasil/Validasi Luaran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penilaian hasil/validasi luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian hasil/validasi luaran dilakukan oleh P3M dengan menugaskan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran.
3. Apabila luaran belum sesuai target yang dijanjikan, maka ketua tim peneliti/pengabdian kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk memenuhi target luaran tersebut dan P3M akan melakukan validasi luaran kembali.
4. P3M dapat melaksanakan penilaian hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar apabila diperlukan.
5. Penilaian hasil/validasi luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh P3M.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik, tahapan pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijadwalkan dengan transparan. Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lingkungan Poltekpar Bali disajikan pada Google Calendar (<https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/tasks>)



**Gambar 2. 1 Jadwal Tentatif Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekpar Bali**

Pada tabel 2.1, disajikan juga Ringkasan Skema, Syarat Tim Pelaksana, Lama Usulan, Dan Beserta Pendanaan Program Penelitian berdasarkan skema yang berlaku.

**Tabel 2. 1**  
**Ringkasan Skema, Syarat Tim Pelaksana, Lama Usulan, Dan Beserta Pendanaan Program Penelitian di Poltekpar Bali**

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan Sesuai DIPA	Lama Usulan
<b>1. Skema Penelitian Dasar</b>			
<b>Penelitian Dosen Pemula (PDP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor yang berasal dari perguruan tinggi, dan memiliki ID SINTA;</li> <li>• Anggota pengusul 1-2 orang;</li> <li>• Anggota pengusul tidak dibatasi jenjang jabatan fungsional dan pendidikan;</li> <li>• Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua.</li> </ul>	DIPA penelitian dengan besaran maksimum Rp15.000.000	Maksimal 6 bulan
Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua pengusul minimal S2 dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni;</li> <li>• Anggota pengusul 1-2 orang;</li> </ul>	DIPA penelitian dengan besaran maksimum Rp50.000.000	1 tahun
<b>Skema Penelitian Terapan</b>			
<b>Penelitian Produk Vokasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan</li> <li>• S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; dan memiliki SINTA Score Overall</li> </ul>	DIPA penelitian dengan besaran maksimum Rp50.000.000	



Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan Sesuai DIPA	Lama Usulan
	<p>minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 sebagai penulis pertama atau korespondensi dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat);</li> <li>• Anggota pengusul 2-3 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra pengguna yang dibuktikan dengan surat penunjukan dari mitra pengguna.</li> </ul>		
<b>3. Skema Penelitian Pengembangan</b>			
<b>Penelitian Pengembangan (PP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua pengusul yang ditunjuk berpendidikan S3 dengan jabatan</li> </ul>	DIPA penelitian dengan besaran maksimum Rp70.000.000	

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan Sesuai DIPA	Lama Usulan
	<p data-bbox="595 235 858 459">fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.</p> <ul data-bbox="549 472 874 1904" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="549 472 874 1355">• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau korespondensi dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud dan memiliki paten/ paten sederhana dengan status terdaftar atau granted atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian;</li> <li data-bbox="549 1368 874 1825">• Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.</li> <li data-bbox="549 1839 874 1904">• Anggota pengusul minimum</li> </ul>		

Ringkasan skema, syarat tim pelaksana, lama usulan, dan beserta pendanaan program pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2**  
**Ringkasan Skema, Syarat Tim Pelaksana, Lama Usulan, Dan Beserta Pendanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekpar Bali**

<b>Skema Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Pembiayaan</b>
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PMB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pelaksana memiliki kompetensi multi disiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan;</li> <li>2. Minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri ;</li> <li>3. Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekpar Bali minimal 2 indikator</li> <li>4. Pengusul hanya boleh melaksanakan skema pemberdayaan berbasis masyarakat monotahun sebanyak dua kali sebagai ketua</li> <li>5. Tim pelaksana terdiri dari lima orang (satu ketua dan empat anggota);</li> <li>6. ketua pengusul memiliki minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni</li> </ol>	DIPA PKM dengan besaran maksimum Rp50.000.000
2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pengusul berjumlah lima orang (1 ketua dengan 4 orang anggota);</li> </ol>	DIPA PKM dengan besaran maksimum Rp20.000.000

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Pembiayaan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/ sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda;</li> <li>3. Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekpar Bali minimal 2 indikator</li> <li>4. Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa per tahun;</li> <li>5. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.</li> </ol>	
Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pengusul berjumlah enam orang (1 ketua dengan 5 orang anggota). Untuk skema ini dapat melibatkan minimal tim dari perguruan tinggi mitra;</li> <li>2. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan</li> <li>3. kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda;</li> <li>4. Tim pengusul harus</li> </ol>	DIPA PKM dengan besaran maksimum Rp40.000.000

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Pembiayaan
	<p>melibatkan minimal empat orang mahasiswa/ tahun</p> <p>5. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.</p> <p>6. Untuk skema PDW membutuhkan surat keterangan ketua lembaga/MoU direktur terkait penunjukan desa binaan</p>	
<p>4. Skema Pemberdayaan Mitra Vokasi (PBMV)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pengusul berasal dari PT pendidikan vokasi dengan minimal skor SINTA 100 untuk sains dan teknologi dan 50 untuk sosial humaniora;</li> <li>2. Tim pengusul maksimal berjumlah enam orang (1 ketua dengan 5 orang anggota). Salah satu anggota berasal dari mitra Industri, anggota lainnya boleh berasal dari PT akademik;</li> <li>3. Anggota tim pengusul yang berasal dari mitra industri mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan skema yang diusulkan, dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan mitra industri;</li> <li>4. Tim pengusul memiliki hasil riset terapan</li> </ol>	

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Pembiayaan
	<p>yang siap diimplementasikan;</p> <p>5. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani</p> <p>6. Tim pengusul harus melibatkan lima orang mahasiswa minimal pada semester 5</p>	

### ***Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi***

Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal Poltekpar Bali harus memenuhi sejumlah persyaratan guna memastikan kualitas dan integritas proses review. Persyaratan ini ditujukan untuk menjamin bahwa reviewer memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, serta dapat memberikan evaluasi yang objektif dan konstruktif. Berikut adalah ekspansi dari persyaratan yang umumnya diperlukan:

Persyaratan reviewer penelitian internal Poltekpar Bali meliputi:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- b. Skor Sinta 3 tahun lebih dari 50 untuk bidang sains dan teknologi, dan atau lebih dari 25 untuk bidang sosial humaniora dan seni;
- c. Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran;
- d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama atau penulis korespondensi;
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah nasional.

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian/ pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. P3M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian/ pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke P3M
- c. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. P3M mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka.
- e. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi — melalui SK penetapan reviewer – dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

### **Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Riset dan Inovasi. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Setiap tahun, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk digunakan sebagai rujukan penganggaran pada tahun berikutnya. Setiap pengusul wajib merujuk PMK tentang SBK yang berlaku pada tahun pendanaan. SBK Riset dan Inovasi merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset dan Inovasi harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset dan Inovasi. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan ruang lingkup penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan, dimana biaya per unit diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran. Menteri Keuangan setiap tahun mengeluarkan peraturan tentang SBM yang dapat dirujuk oleh para pengusul. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran penelitian dilaporkan melalui SINERGI pada penggunaan anggaran 100% mengikuti format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM) yang ditandatangani di atas materai.

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban dan tata cara penggunaan anggaran serta pembayaran pajak dibuat oleh ketua pelaksana kegiatan, mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran penelitian dilaporkan melalui SINERGI 100% mengikuti format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM) yang ditandatangani di atas materai. Bukti-bukti penggunaan dana, dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal.

## **2.4 PENILAIAN**

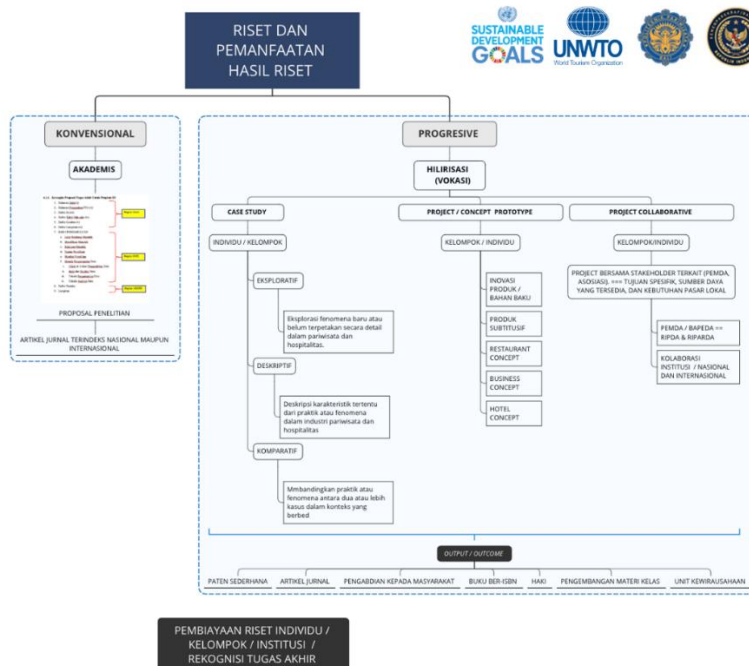
Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan, pembahasan, dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian monitoring dan evaluasi (monev).

Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan menyampaikan laporan akhir. Laporan akhir dilakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran (untuk pengabdian kepada masyarakat), oleh ketua peneliti/pelaksana pengabdian. Penilaian seleksi, monitoring dan evaluasi, laporan akhir penelitian, dan luaran mengacu pada lampiran serta pengabdian pada lampiran.

# BAB III PROGRAM PENELITIAN

Dalam ekosistem akademik Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, penelitian diposisikan sebagai pilar fundamental yang tidak hanya bertujuan untuk memperkaya basis pengetahuan tetapi juga untuk mengembangkan kapasitas peneliti secara individu dan kolektif. Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas penelitian, Poltekpar Bali diharapkan dapat membangun rekam jejak akademis yang solid, yang pada gilirannya akan menumbuhkan budaya riset yang unggul dan berkelanjutan. Luaran dari penelitian tidak hanya diharapkan menjadi kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai *leverage* strategis yang mendorong transisi ke penelitian terapan dan pengembangan. Hal ini secara dirancang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perguruan tinggi, serta dengan lembaga penelitian lain, menciptakan jaringan akademis yang dinamis dan produktif.

Penelitian terapan, diharapkan dapat berfungsi sebagai inkubator untuk teknologi inovatif dan karya monumental yang siap untuk hilirisasi dan diaplikasikan dalam konteks nyata. Ini membuka jalan bagi peneliti untuk tidak hanya memperdalam keahlian tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai pemimpin pemikiran di tingkat internasional. Dengan demikian, penelitian terapan di Poltekpar Bali ditujukan untuk menghasilkan solusi pragmatis yang dapat menjawab tantangan industri dan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, melalui kemitraan strategis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Poltekpar Bali mengantisipasi penciptaan nilai tambah ekonomi dan sosial yang signifikan dari penelitian yang dilakukan. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat keterkaitan antara akademi dengan sektor industri tetapi juga mempercepat proses inovasi dari kampus menuju industri.



**Gambar 3. 1 Skema Penelitian di Poltekpar Bali**



Skema penelitian yang diselenggarakan oleh Poltekpar Bali untuk dosen meliputi tiga (3) skema berdasarkan capaian TKT-nya yaitu Skema Penelitian Dasar, Skema Penelitian Terapan dan Skema Penelitian Pengembangan. Panduan Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi sebagaimana diuraikan pada lampiran Adapun skema program penelitian terdiri dari:

1. Skema Penelitian Dasar
  - Penelitian Dosen Pemula.
  - Penelitian Kerja Sama.
2. Skema Penelitian Terapan
  - Penelitian Terapan Penugasan
  - Penelitian Produk Vokasi
3. Skema Penelitian Pengembangan

Seluruh skema penelitian di atas diarahkan mengacu pada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas. Sepuluh bidang fokus yang dimaksud disajikan dalam lampiran

### **3.1 SKEMA PENELITIAN DASAR (PD)**

Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi dan pengembangan kepariwisataan dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerja sama dari dalam atau luar negeri.

#### **A. PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP) SKEMA ARTIKEL ILMIAH**

Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan agar para peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Dosen Pemula diatur sebagai berikut:

##### **1. Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian harus melibatkan semua tim peneliti. Luaran wajib PDP adalah:

- a. Satu artikel di jurnal internasional; atau
- b. Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 6;

##### **2. Persyaratan Pengusulan**

- a. Ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor dan memiliki ID SINTA;
- b. Anggota pengusul 1-2 orang;
- c. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua;
- d. Pembiayaan mengacu DIPA dengan besaran maksimum Rp20.000.000 belum termasuk anggaran publikasi)

#### **B. PENELITIAN KERJASAMA (PK)**

##### **Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN)**

Pemerintah perlu terlibat dalam meningkatkan kapasitas penelitian dosen PTV. Skema

Penelitian Dosen Pemula (PDP) ditawarkan dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian ini. Skema PDP hanya bisa diusulkan sebanyak dua (2) kali sebagai ketua. Untuk menjembatani peneliti pemula ke peneliti utama, diperlukan suatu tahapan lain melalui skema tertentu.

Luaran dan persyaratan pengusul penelitian kerja sama dalam negeri diatur sebagai berikut:

### **Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian harus melibatkan seluruh perguruan tinggi anggota tim. Luaran wajib per tahun berupa:

- a. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi; atau
- b. Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 3; atau
- c. Satu buku hasil penelitian ber ISBN.

### **Persyaratan Pengusulan**

Persyaratan TPP sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul minimal S2 dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni;
- b. Anggota pengusul maksimal 4 orang;
- c. Pembiayaan mengacu DIPA dengan besaran maksimum Rp50.000.000 belum termasuk anggaran publikasi)

## **C. PENELITIAN PRODUK VOKASI (P2V) SKEMA PATEN SEDERHANA**

Penelitian Produk Vokasi (P2V) memegang peranan penting dalam mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dasar ke dalam aplikasi praktis yang dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri, atau sektor pemerintahan. Tujuan utama dari P2V adalah untuk mendorong terciptanya inovasi dan produk hilirisasi yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dan memiliki nilai tambah ekonomis serta sosial yang signifikan.

P2V bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pengembangan masyarakat, industri, dan pemerintahan dengan menyediakan solusi inovatif untuk masalah yang ada. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada hasil, P2V mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang dinamis dan berkelanjutan.

Luaran dan persyaratan pengusul P2V diatur sebagai berikut:

### **1. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian berupa Draft paten sederhana yang siap untuk diproses melalui Ditjen HKI

### **2. Persyaratan Pengusulan**

Persyaratan pengusul produk vokasi sebagai berikut:

1. Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan memiliki SINTA Score Overall minimal 25

2. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau memiliki minimal satu Kekayaan Intelektual (KI) berupa HAKI, paten/ paten sederhana terdaftar dan lainnya bersertifikat;
3. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Format kerjasama dengan mitra pengguna dapat dilihat pada lampiran. Adanya dukungan pendanaan (baik in-cash maupun in-kind) oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan;
4. Institusi mitra yang dimaksud pada poin c adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian;
5. Anggota pengusul 3-4 orang dan minimum 1 orang anggota dosen dan 1 orang berasal dari mitra pengguna yang dibuktikan dengan surat penunjukan dari mitra pengguna;
6. Mendeskripsikan teknologi yang dikembangkan bersama mitra yang berisi: spesifikasi produk dan proyeksi pasar.

#### **D. SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN**

Penelitian Pengembangan merupakan tahap lanjutan dalam siklus inovasi, yang mengambil tongkat estafet dari Riset Terapan yang telah menunjukkan kelayakan teknologi atau solusi untuk diimplementasikan lebih lanjut. Fokus utama dari skema penelitian ini adalah transisi dari konsep atau prototipe ke produk yang siap dipasarkan, yang tidak hanya memenuhi standar industri tetapi juga memiliki daya saing dan potensi komersialisasi tinggi. Ini merupakan langkah krusial dalam menjembatani jurang antara penemuan ilmiah dan penerapan praktis di pasar.

Dalam konteks Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Penelitian Pengembangan diarahkan untuk mengaktualisasikan produk-produk Prioritas Riset Nasional yang telah diidentifikasi untuk hilirisasi. Artinya, produk-produk ini dipandang memiliki nilai tambah yang signifikan untuk sektor-sektor tertentu dalam industri, khususnya yang berhubungan dengan pariwisata dan hospitalitas, yang merupakan sektor kunci di Bali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi komersialisasi produk hasil riset, dengan cara yang berkelanjutan dan inovatif.

Keterlibatan mitra pengguna atau investor dalam penelitian ini tidak hanya dianggap penting, tetapi juga strategis. Mitra ini dapat berupa entitas industri, pemerintah, atau investor swasta yang memiliki kepentingan langsung dalam pengembangan dan komersialisasi produk. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan pasar, dan modal yang diperlukan untuk mempercepat proses pengembangan produk dan meminimalisir risiko kegagalan komersial. Mitra pengguna atau investor juga dapat memberikan masukan kritis mengenai aspek desain, produksi, dan pemasaran produk, sehingga memastikan produk akhir tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selanjutnya, penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai aspek kunci dalam proses hilirisasi. Dengan memastikan bahwa produk hasil

riset dilindungi oleh hak KI, Poltekpar Bali dan mitra kolaborasinya dapat menjaga integritas inovasi mereka dari potensi plagiarisme atau eksploitasi ilegal oleh pihak lain. Perlindungan KI ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaman bagi investasi yang telah dilakukan tetapi juga sebagai nilai tambah dalam negosiasi komersialisasi produk.

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pengembangan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan
- b. Merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;
- c. Membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, and Community (ABGC); dan
- d. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

### **2. Luaran Penelitian**

Luaran wajib Penelitian Pengembangan dapat berupa produk industri yang siap untuk dip

### **3. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua (2) artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud atau memiliki paten/ paten sederhana dengan status minimum terdaftar atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian;
- c. Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in-cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan;
- d. Anggota pengusul minimum 3 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra industri yang dibuktikan dengan surat penunjukan oleh lembaga/industri.

## **BAB IV**

### **PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Poltekpar Bali mengadopsi pendekatan inovatif dalam menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat. Paradigma baru ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tetapi juga untuk memastikan bahwa solusi tersebut komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. Ini menandai pergeseran dari sekadar memberi bantuan menjadi mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, resilien, dan mampu mengatasi tantangan masa depan.

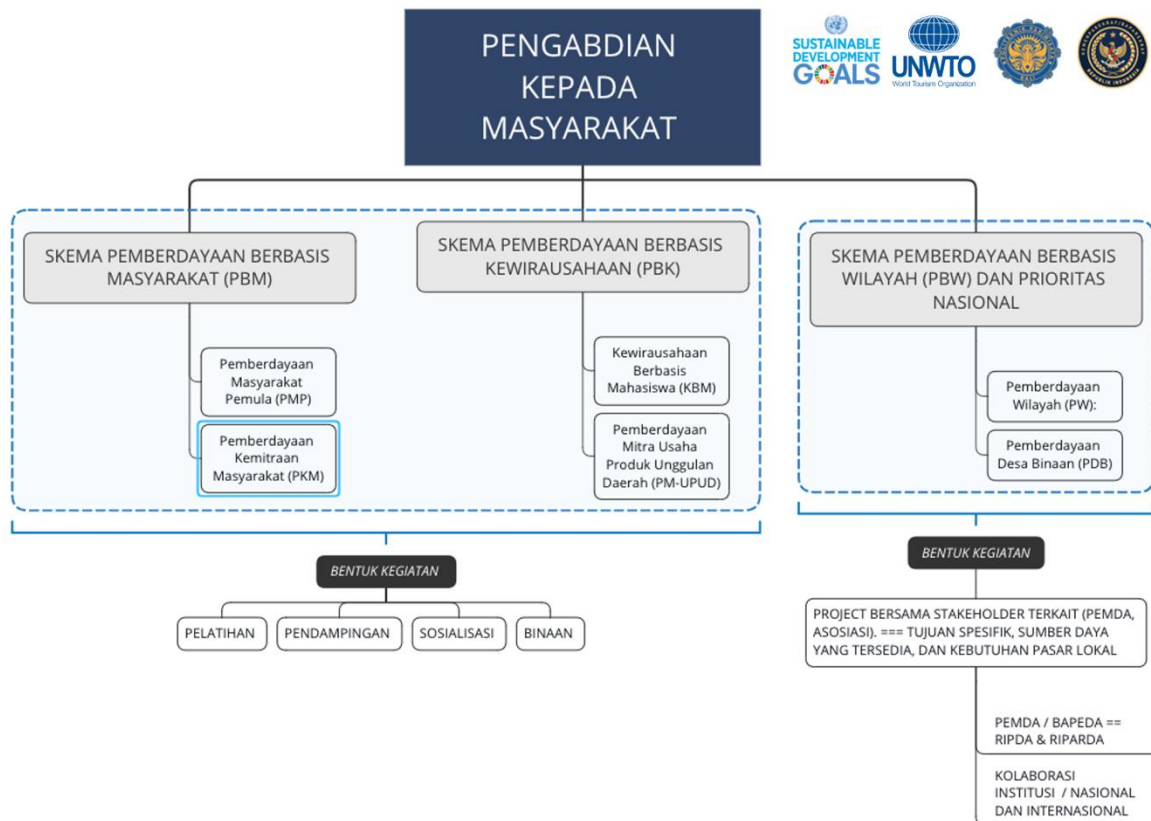
Dalam kerangka paradigma baru ini, P3M Poltekpar Bali membagi Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menjadi dua inisiatif utama: Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dan Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP). Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat dirancang untuk memperkuat hubungan antara Poltekpar Bali dengan komunitas lokal, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan ini, masyarakat lokal dapat memanfaatkan sumber daya akademik dan penelitian Poltekpar Bali untuk mengembangkan solusi inovatif atas berbagai masalah yang mereka hadapi.

Sementara itu, Pemberdayaan Masyarakat Pemula berfokus pada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan individu atau kelompok masyarakat yang belum banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi atau sosial. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menginisiasi dan menjalankan proyek atau usaha mereka sendiri, sehingga mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) memungkinkan kolaborasi tidak hanya dengan mitra lokal tetapi juga dengan perguruan tinggi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri. Kerjasama nasional dan internasional ini membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, memperluas wawasan dan kompetensi masyarakat lokal, dan meningkatkan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, P3M Poltekpar Bali berusaha untuk mengintegrasikan inovasi global dengan kearifan lokal, menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan konteks sosial-budaya setempat.

Dengan pendekatan ini, kegiatan PKM Poltekpar Bali bertujuan untuk menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada pembangunan masyarakat di bidang pariwisata dan hospitalitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali dan sekitarnya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat lainnya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Berikut disampaikan diagram program Pengabdian Kepada Masyarakat P3M Poltekpar Bali.



Ruang lingkup, tujuan, luaran, kriteria, sasaran, persyaratan, dan karakteristik Program PKM diatur sebagai berikut:

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMULA (PMP)

Dikhususkan kepada dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster pratama dan binaan. Dimungkinkan berkolaborasi lintas klaster (klaster pratama dan binaan) selama masih dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama. Kolaborasi pada skema ini memungkinkan dilakukan dengan perguruan tinggi/ DUDI dalam negeri maupun luar negeri. Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dengan durasi minimal 6 bulan untuk menyelesaikan minimal satu bidang masalah.

### PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

Dikhususkan kepada dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster selain klaster binaan. Dimungkinkan berkolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) selama masih dalam wilayah LLDIKTI yang sama. Kolaborasi pada skema ini memungkinkan dilakukan dengan Perguruan tinggi/ DUDI dalam negeri maupun luar negeri. Program PKM dimaksudkan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dengan durasi minimal 8 bulan untuk menyelesaikan minimal dua bidang masalah.

#### 1. Luaran Skema

Luaran wajib Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:

- a. Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai

- permasalahan yang dihadapi, yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuisisioner kepada mitra, atau pengukuran berdasarkan skala keterampilan mitra;
- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal Ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN dari seminar nasional;
  - c. Satu berita publikasi pada media massa cetak/elektronik
  - d. Video kegiatan.

Luaran tambahan skema PBM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib seperti metode/sistem, KI, buku ber-ISBN, penerapan teknologi dan inovasi, dan publikasi internasional. Indikator capaian luaran skema PBM sesuai lampiran

## **2. Kriteria Skema**

Kriteria PBM adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup PMP dikhususkan untuk klaster pratama dan binaan dan dimungkinkan berkolaborasi lintas klaster (klaster pratama dan binaan);
- b. Ruang lingkup PKM dikhususkan untuk PT selain klaster binaan;
- c. Ruang lingkup PKM dimungkinkan berkolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama);
- d. IPTEKS yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- e. Usulan dana ke DAPTV maksimum Rp25.000.000 untuk PMP dan Rp50.000.000 untuk PKM;
- f. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat adalah program monotahun dengan jangka waktu kegiatan selama minimal 6 bulan (PMP) dan 8 bulan (PKM);
- g. Untuk PMP dan PKM melibatkan minimal 2 mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 5 SKS dalam pelaksanaannya;
- h. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator;
- i. Melibatkan minimal satu kelompok masyarakat yang didampingi;
- j. Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah setiap kelompoknya untuk ruang lingkup PKM yang membutuhkan kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai Lampiran 1;
- k. Permasalahan yang ditangani pada mitra untuk PMP minimal satu bidang masalah setiap kelompoknya yang membutuhkan kepakaran multi disiplin;
- l. Tidak diperkenankan untuk bermitra dengan mitra sasaran yang sedang dilibatkan dalam kegiatan dari DRTPM/DAPTV pada tahun anggaran yang sama;
- m. Tidak diperkenankan untuk mengubah/mengganti mitra sasaran yang sudah diajukan pada proposal.

## **3. Sasaran Skema**

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

- a. Masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), pengrajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya;
- b. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berkeinginan yang kuat menjadi wirausahawan dan diwajibkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 orang;
- c. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa) dapat berupa masyarakat sekolah sederajat (PAUD, SD, SMP, SMA), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

- d. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan diwajibkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga;
- e. Mitra sasaran yang belum produktif secara ekonomis namun berkeinginan kuat menjadi wirausahawan diwajibkan membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain;
- f. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa) dapat berupa masyarakat sekolah sederajat (PAUD, SD, SMP, SMA), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

#### **4. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul skema PBM sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multi disiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan;
- b. Minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri ;
- c. Pengusul hanya boleh melaksanakan skema pemberdayaan berbasis masyarakat monotahun sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup yang sama;
- d. Tim pelaksana terdiri dari tiga orang (satu ketua dan dua anggota);
- e. Untuk PMP, ketua pengusul memiliki minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni; dan
- f. Untuk PKM, ketua pengusul memiliki minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.

#### **5. Format Usulan**

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi APA (format dapat diunduh di <https://p3m.ppb.ac.id/index.php/pengabdian/> )

### **SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PBK)**

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan (PBK) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis IPTEKS dalam lingkup pariwisata dan hospitalitas yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Ruang lingkup skema PBK yaitu Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM) dan Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD). Pada skema PBK dimungkinkan bekerjasama dengan perguruan tinggi/ DUDI dari dalam dan luar negeri.

Ruang lingkup, tujuan, luaran, kriteria, sasaran, persyaratan, dan format Skema Kewirausahaan diatur sebagai berikut:

#### **1. RUANG LINGKUP SKEMA**

##### **1.1 Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)**

Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM) merupakan sebuah inisiasi yang dirancang untuk



menyediakan platform komprehensif bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung mahasiswa yang aktif dalam Program Kewirausahaan di Poltekpar Bali, skema kewirausahaan lainnya, atau bagi mereka yang sudah memulai perjalanan mereka dalam merintis usaha. Tujuan utama dari KBM adalah untuk melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia kewirausahaan.

Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) memainkan peran krusial dalam struktur program KBM. DUDI tidak hanya berfungsi sebagai tempat magang untuk mahasiswa, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari praktik nyata di lapangan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator yang membantu dalam pengembangan kurikulum pelatihan kewirausahaan. Melalui kemitraan ini, mahasiswa diberikan akses ke jaringan profesional yang luas, wawasan industri yang berharga, serta kesempatan untuk membangun hubungan yang dapat mendukung aspirasi kewirausahaan mereka di masa depan.

Program KBM dirancang untuk mencakup berbagai aspek kewirausahaan, mulai dari pengembangan ide bisnis, perencanaan dan manajemen bisnis, strategi pemasaran, hingga pemahaman tentang aspek hukum dan keuangan yang terkait dengan menjalankan sebuah usaha. Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan wirausaha muda yang tidak hanya memiliki keberanian dan inovasi untuk memulai bisnis baru, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka dalam jangka panjang.

Selain pelatihan langsung, KBM juga menekankan pentingnya pembelajaran melalui praktik. Magang dengan DUDI memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks nyata, memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan nyata, berinovasi dalam menemukan solusi, dan membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan bisnis. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa tetapi juga memberi manfaat kepada DUDI melalui akses ke ide-ide segar dan potensi rekrutmen bakat masa depan.

KBM berperan sebagai jembatan penting antara teori kewirausahaan dan aplikasinya dalam praktik bisnis nyata. Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan alat yang diperlukan untuk sukses dalam dunia kewirausahaan tetapi juga mendukung penciptaan ekosistem kewirausahaan yang dinamis dan berkelanjutan di lingkungan Poltekpar Bali dan komunitas yang lebih luas. Melalui upaya kolaboratif dengan DUDI, KBM bertujuan untuk menciptakan generasi wirausaha baru yang berdaya, inovatif, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan masyarakat.

## **1.2 Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)**

Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pengembangan produk atau jasa unggulan dari suatu daerah, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi, kelompok usaha masyarakat, serta usaha kecil dan menengah (UKM/UMKM). Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan komprehensif yang mencakup peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta akses ke pasar baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, PM-UPUD berusaha untuk tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk atau jasa, tetapi juga memastikan bahwa usaha-usaha tersebut dapat bersaing di pasar global tanpa

menghilangkan identitas dan keunikan yang menjadi ciri khas daerahnya.

Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan komponen penting dari PM-UPUD, di mana DUDI berperan sebagai mitra penerima manfaat yang tidak hanya memberikan masukan berharga untuk pengembangan produk, tetapi juga membuka akses ke jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas. Melalui kemitraan ini, usaha-usaha lokal diberikan kesempatan untuk memahami dinamika pasar yang aktual, memperoleh feedback langsung dari pelaku industri, dan menyesuaikan produk atau jasa mereka agar lebih relevan dan menarik bagi konsumen.

## **2. TUJUAN SKEMA**

Tujuan Skema PBK sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya;
- b. Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, UMKM/UKM agar tangguh, berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;
- c. Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri;
- d. Mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, DUDI, Pemda dan masyarakat luas;
- e. Untuk KBM bertujuan menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang sesuai bagi mahasiswa yang sedang merintis usaha dan menciptakan wirausaha baru mandiri berbasis IPTEKS;
- f. Untuk PM-UPUD bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UKM/UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri dan pasar global; meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya melalui aplikasi hasil riset perguruan tinggi; dan
- g. Untuk PUK bertujuan menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra; meningkatkan revenue generating unit perguruan tinggi; memberikan kesempatan serta pengalaman kerja kepada mahasiswa KBM; mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi; membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru; mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat; optimalisasi unit/lab di dalam PTV menjadi unit income generating, dan membina kerja sama dengan swasta, industri dan sektor pemasaran.

## **3. LUARAN SKEMA**

Luaran wajib skema PBK adalah:

- a. Peningkatan level keberdayaan mahasiswa wirausaha (program KBM), mitra usaha (PM-UPUD), dan revenue generating PT (khusus PUK);
- b. Menghasilkan minimal satu produk yang ber-KI (hak cipta, paten, dan paten sederhana) di tahun ke 3;
- c. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN dari seminar nasional (pada tahun ke 1);
- d. Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding terindeks Scopus dari

seminar internasional yang dilaksanakan di luar negeri secara daring atau dilaksanakan di dalam negeri baik secara daring/luring, atau satu artikel di jurnal internasional terindeks Copernicus/setara (pada tahun ke 2 dan 3);

- e. Video kegiatan (setiap tahun);
- f. Berita di media massa cetak/elektronik (setiap tahun);
- g. Minimal lima wirausaha baru mandiri berbasis IPTEKS per tahun yang siap beraktivitas dimasyarakat (khusus KBM);
- h. Luaran tambahan skema PBK dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib; dan
- i. Indikator capaian luaran skema PBK sesuai lampiran

#### **4. KRITERIA SKEMA**

Kriteria skema PBK meliputi:

- a. Ruang Lingkup KBM wajib berkolaborasi dengan DUDI sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator;
- b. Ruang lingkup PM-UPUD wajib melakukan kolaborasi dengan DUDI sebagai mitra penerima manfaat;
- c. Ruang lingkup PUK dimungkinkan berkolaborasi dengan DUDI sebagai mitra dalam pengembangan usaha kampus;
- d. Untuk ruang lingkup PUK diutamakan usaha yang sudah berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas di dalam struktur perguruan tinggi serta adanya komitmen perguruan tinggi dalam pendanaan;
- e. Jarak lokasi desa mitra dari perguruan tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu provinsi, kecuali KBM dan PUK berada di dalam perguruan tinggi.
- f. Melibatkan mahasiswa per kelompok yang dibentuk maksimal 3 orang.
- g. Tidak diperkenankan untuk mengubah/mengganti mitra sasaran yang sudah diajukan pada proposal

#### **5. SASARAN SKEMA**

Sasaran Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

- a. Mahasiswa sejumlah minimal 5 orang, dengan minat meningkatkan kemampuan wirausaha dan mendirikan unit usaha spesifik sesuai dengan minat dan bidang ilmu dari mahasiswa dan timnya.
- b. Setiap tahun minimal menghasilkan 3 orang mahasiswa yang mampu menjadi wirausaha mandiri (tenant outwall) dan memiliki minimal 3 kriteria, yaitu:
  - Memiliki produk/jasa yang akan dijual/ditawarkan,
  - Tercatat dengan tertib keuangan berupa cash flow, pembukuan keuangan, bukti (kuitansi) pembelian bahan/jasa, dan penjualan usahanya,
  - Memiliki metode/strategi pemasaran, baik online maupun offline;
- c. Mahasiswa diinkubasikan oleh tim pengusul (dosen) dengan pengetahuan dan kemampuan untuk pembuatan rencana bisnis hingga penerapannya; dan
- d. Mahasiswa yang memiliki pengalaman pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau PKM yang terkait dengan kewirausahaan akan lebih diutamakan.

Sasaran Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

- a. Sasaran kegiatan ini adalah mitra unit usaha di suatu daerah tertentu yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang perlu dikembangkan;
- b. Keunggulan produk tersebut dinyatakan dalam dokumen resmi pemerintah setempat

- misalnya (RPJMD atau RPJMP);
- c. Mitra yang dilibatkan minimal dua dengan unit usaha yang sudah memiliki aset senilai Rp150.000.000 dan siap untuk dikembangkan; dan
  - d. Minimal 4 orang mahasiswa yang dilibatkan

## **6. PERSYARATAN PENGUSUL**

Persyaratan pengusul skema PBK meliputi:

- a. Tim pengusul berjumlah empat orang (1 ketua dengan 3 orang anggota);
- b. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/ sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda;
- c. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekpar Bali minimal 2 indikator;
- d. Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa per dan
- e. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.

## **7. FORMAT USULAN**

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi APA (format dapat diunduh di <https://p3m.ppb.ac.id/index.php/pengabdian/> )

### **1.3 Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)**

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan (PBW) ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota, desa/nagari (nama lain dengan tata kelola yang sama), kelurahan, desa adat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Non RPJMD, baik secara Bottom Up ataupun Top Down.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum, dunia pendidikan, masyarakat usaha dan industri yang terdapat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi binaan Poltekpar Bali. Bentuk-bentuk kegiatan berbasis kewilayahan ini adalah bersifat kompetitif termasuk Pemberdayaan Wilayah (PW) dan Pemberdayaan Desa Binaan (PDB). Pada skema PBW dimungkinkan bekerja sama dengan perguruan tinggi/ DUDI dari dalam dan luar negeri.

### **1. RUANG LINGKUP SKEMA**

#### **Pemberdayaan Wilayah (PW)**

Pemberdayaan Wilayah (PW) merupakan inisiatif komprehensif yang dirancang untuk mendorong penciptaan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama strategis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah (pembka/pemkot), dan masyarakat itu sendiri. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah, berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini mengedepankan pemanfaatan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan spesifik wilayah, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Tujuan utama dari Pemberdayaan Wilayah adalah untuk menciptakan sinergi antara keahlian yang dimiliki oleh masyarakat akademis perguruan tinggi dengan kebijakan dan program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah kewilayahan, utamanya pariwisata dan hospitalitas.

Kerjasama dengan pemerintah daerah merupakan aspek kunci dalam program Pemberdayaan Wilayah, memastikan bahwa inisiatif yang dilakukan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga memungkinkan perguruan tinggi untuk berkontribusi langsung dalam implementasi dan keberhasilan program-program RPJMD atau RPJMDes, melalui pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dihasilkan dari riset.

Pemberdayaan Wilayah menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Sinergi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kapasitas jangka panjang wilayah dan masyarakatnya, sehingga dapat menciptakan sistem yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta tantangan masa depan.

Dengan menerapkan pendekatan PKM ini diharapkan dapat tercipta solusi yang tidak hanya inovatif dan relevan dengan kebutuhan wilayah, tetapi juga berdampak positif dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kewilayahan melalui kerjasama yang efektif dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya, menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)**

Program Pengembangan Desa Binaan (PDB) yang diinisiasi oleh Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali merupakan inisiasi yang bertujuan untuk mengaplikasikan hasil riset unggulan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh desa binaan. Program ini dirancang untuk memberikan solusi yang inovatif dan efektif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra desa atau desa adat, menggunakan pendekatan holistik berbasis riset multi disiplin. Dengan fokus pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, PDB mencakup spektrum luas intervensi yang menargetkan berbagai aspek pembangunan masyarakat, termasuk ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya desa. Melalui kolaborasi ini, PDB tidak hanya mendukung pelaksanaan inisiatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa tetapi juga membuka jalan untuk inovasi dan pendekatan baru dalam menangani isu-isu pembangunan desa.

Salah satu tujuan utama dari PDB adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui dukungan terhadap Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM), dan kelompok usaha lainnya. Program ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk desa, sekaligus memastikan bahwa praktik-praktik tersebut berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks pariwisata, PDB bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata desa dengan cara yang bertanggung jawab, memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan.

Visi jangka panjang dari PDB adalah pembentukan Science Techno Park berbasis desa binaan, sebuah ekosistem inovasi yang mengintegrasikan penelitian, pendidikan, dan praktek industri dalam konteks pembangunan desa. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan hub inovasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Program Pengembangan Desa Binaan dari Poltekpar Bali menunjukkan komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan sinergi antara pengetahuan akademis dan kebutuhan masyarakat desa, PDB berupaya untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa binaan.

## **2. TUJUAN SKEMA**

Tujuan skema PBW sebagai berikut:

- a. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan;
- b. Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMDes;
- d. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), Pendidikan, kesehatan, lingkungan, Pariwisata dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah;
- e. Memperkuat sinergi Poltekpar Bali dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan

## **3. LUARAN SKEMA**

Luaran wajib PBW adalah:

- a. Menghasilkan minimal satu produk yang ber-KI meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, desain industri atau
- b. Satu publikasi di prosiding seminar internasional di dalam negeri ber-ISBN atau;
- c. Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding terindeks Scopus dari seminar internasional yang dilaksanakan di luar negeri secara daring atau dilaksanakan di dalam negeri baik secara daring/luring, atau satu artikel di jurnal internasional terindeks Copernicus/setara (pada tahun ke 2 dan ke 3); dan
- d. Berita di media massa cetak/elektronik

## **4. KRITERIA SKEMA**

Kriteria PBW sebagai berikut:

- a. Minimal 40% dari total anggaran yang diajukan/disetujui dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan) ditujukan untuk membantu mitra;
- b. Jarak lokasi kegiatan dari PT pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu provinsi, kecuali PW boleh lintas provinsi melalui kemitraan dengan perguruan tinggi setempat dengan anggaran Pemda/ Pemkot/CSR/DUDI yang rasional;
- c. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekpar Bali minimal 2

- indikator;
- d. IPTEKS yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
  - e. Program PBW memungkinkan untuk berkolaborasi dengan PT Dalam dan LN dengan pendanaan yang jelas;
  - f. Tidak diperkenankan untuk mengubah/mengganti mitra sasaran yang sudah diajukan pada proposal

## **5. SASARAN SKEMA**

Sasaran PW adalah:

- a. Desa/kelurahan dengan minimal dua bidang kewilayahan yang berbeda pada setiap tahun kegiatan;
- b. Bidang kewilayahan yang dimaksud adalah bidang pariwisata dan hospitalitas;
- c. Kegiatan kewilayahan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemda/ pemkot yang sudah dituangkan dalam RPJM/RPJMDes; dan
- d. kegiatan dengan jumlah anggota minimum 20 orang (untuk kelompok masyarakat), dengan dua bidang permasalahan yang berbeda pada setiap kelompok mitra sasaran.

Sasaran PDB adalah:

- a. Desa (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat, dengan minimal dua bidang masalah berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa dan memerlukan kepakaran perguruan tinggi untuk dikembangkan menjadi unggulan desa;
- b. Merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi science techno-park perguruan tinggi, wilayah yang menjadi lokasi riset dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pengusul;
- c. Melibatkan minimal dua kelompok masyarakat (dengan anggota minimal 20 orang) yang didampingi pada setiap tahun kegiatan. Jenis kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa. Pada setiap kelompok masyarakat harus ada dua bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani setiap tahun

## **6. PERSYARATAN PENGUSUL**

Persyaratan pengusul PBW meliputi:

- a. Tim pengusul berjumlah empat orang (1 ketua dengan 3 orang anggota); khusus PW melibatkan minimal satu orang tim dari perguruan tinggi mitra;
- b. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda;
- c. Tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS per tahun kegiatan kepada mahasiswa;
- d. Tim pengusul mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 program PBW;
- e. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.
- f. Untuk skema PDB membutuhkan surat keterangan ketua lembaga/MoU direktur terkait penunjukan desa binaan.

## **7. FORMAT USULAN**

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas,

dan menggunakan aturan sitasi APA (format dapat diunduh di <https://p3m.ppb.ac.id/index.php/pengabdian/> )

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) pengabdian kepada masyarakat. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban dan tata cara penggunaan anggaran serta pembayaran pajak dibuat oleh ketua pelaksana kegiatan, mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan. Bukti-bukti penggunaan dana, dibuat dan disusun berdasarkan RAB yang tercantum dalam proposal.

Transaksi yang dilakukan dalam rangka pembelian bahan, pemberian honorarium, jasa dan sewa akan menimbulkan pajak. Apabila ada pembelanjaan yang pajaknya sudah termasuk harga pembelian, maka wajib melampirkan bukti pembayaran pajak (e-Faktur) dari transaksi terkait. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) wajib dibuat dan pertanggungjawaban keuangan dibuat sesuai dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta menyimpan duplikatnya untuk keperluan pemeriksaan auditor, dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

#### **Komponen Biaya Honorarium**

Komponen honorarium yang diajukan maksimal 15% dari total dana usulan program pengabdian kepada masyarakat. Komponen biaya ini tidak ditujukan kepada tim pelaksana dan mitra pemberi dana maupun mitra sasaran. Komponen biaya honorarium mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
- b. Honorarium narasumber, moderator dan panitia harus berasal dari luar tim dan perguruan tinggi pengusul;
- c. Jumlah panitia yang berhak mendapatkan honor maksimal 10% dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (offline). Kegiatan dengan peserta kurang dari 40 orang, honor panitia maksimal hanya untuk 4 orang; dan
- d. Berlaku untuk tenaga kerja yang disebutkan di atas, dan tidak berasal dari tim pengusul, mahasiswa yang terlibat MBKM, dan mitra;
- a. Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor;

#### **Komponen Biaya Pelatihan**

Komponen biaya pelatihan diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra yang dapat terdiri dari penyelenggaraan workshop, lokakarya, focus group discussion (FGD), peningkatan kapasitas (capacity building), pelatihan, seminar dan diseminasi hasil kegiatan senilai maksimal 20% dari total anggaran yang disetujui. Komponen biaya ini berkaitan dengan tahapan produksi serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan serta meningkatkan produktivitas proses produksi di luar biaya investasi peralatan/TTG dan bahan untuk mitra. Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard/fullday/halfday) dapat digunakan apabila pelaksana melaksanakan workshop, sosialisasi, focus group discussion (FGD), dan lain-lain menggunakan hotel atau ruang pertemuan yang sudah termasuk konsumsi, serta wajib melibatkan peserta dari luar perguruan tinggi;



2. Satuan biaya konsumsi disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruang rapat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, serta hanya menggunakan biaya konsumsi saja;
  - b. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
  - c. Biaya kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam, sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam; dan
  - d. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran.
3. Satuan biaya uang harian rapat/pertemuan di luar kantor atau disebut sebagai uang saku digunakan apabila tim pelaksana melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan/atau akomodasi.

#### **Larangan/Perhatian**

1. Satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor dan konsumsi rapat hanya dapat digunakan apabila menghadirkan peserta dari Kementerian/Instansi/Lembaga lainnya dan/atau masyarakat umum.
2. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.

#### **Komponen Biaya Perjalanan**

Komponen perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat maksimal senilai 20% dari total anggaran yang disetujui untuk dipergunakan oleh tim pelaksana. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/bekerja tim pelaksana. Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut.

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
2. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal;
3. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV; dan
4. Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat at cost sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.

#### **Larangan/Perhatian**

1. Seluruh kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan secara luring, diarahkan untuk diadakan secara daring (online) demi efisiensi biaya. Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diusulkan.
2. Perjalanan dinas yang dianggarkan pengusul harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan dan diarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.
3. Perjalanan yang dianggarkan pengusul hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.

### **Komponen Biaya Lainnya**

Komponen biaya lainnya maksimal 5% dari total anggaran yang disetujui. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti berikut:

1. Pemantauan/monitoring dan evaluasi;
2. Pemenuhan biaya luaran;
3. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi paten/hak cipta;
4. Pendaftaran jurnal/seminar nasional/internasional;
5. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual;
6. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang; dan
7. Pemenuhan luaran lainnya.
  - Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non- elektronik (harga terdaftar di situs web biaya paten DJKI).
  - Penganggaran untuk pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga processing/publication fee yang diminta memperhatikan ekspektasi artikel ilmiahnya terbit secara tepat waktu untuk mempertanggungjawabkan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali ini merupakan upaya yang sistematis dan terukur, dirancang untuk merespons secara efektif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dan sektor industri. Dokumen ini bertujuan untuk memfasilitasi *impact* yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil dalam kegiatan akademik, khususnya dalam konteks penciptaan produk yang dapat diaplikasikan, yang sesuai dengan prinsip *link and match* antara kebutuhan eksplisit dari masyarakat, sektor usaha, dan industri dengan kapasitas riset yang dimiliki oleh dosen. Ini mencerminkan komitmen institusi untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi.

Sebagai acuan resmi, buku panduan ini ditujukan untuk memberikan arahan yang jelas dan metodologis bagi dosen Poltekpar Bali dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas institusional dalam menghasilkan penelitian yang berdampak serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi solusi, dengan harapan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membuatnya lebih dapat diakses dan relevan dengan kebutuhan dinamis dosen dan komunitas yang lebih luas.

Demikian, kegiatan penelitian dan PKM akan memperkaya kualitas dan relevansi output kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menempatkan Poltekpar Bali sebagai institusi yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pariwisata dan hospitalitas, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan kunci dalam penyelesaian masalah sosial-ekonomi. Melalui dedikasi terhadap prinsip-prinsip akademis dan inovasi yang diuraikan dalam buku panduan ini, diharapkan Poltekpar Bali akan memainkan peran vital dalam mendukung Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, buku panduan ini merupakan dokumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk operasional tetapi juga sebagai manifestasi dari aspirasi Poltekpar Bali untuk berkontribusi secara substantif terhadap pembangunan masyarakat dan industri, mempromosikan inovasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing nasional di arena global.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. tentang. Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang RIRN Taun 2017-2045
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 – 2024
8. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi 1 Tahun 2021 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
11. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Format Substansi Proposal Penelitian Skema Artikel Ilmiah

### PROPOSAL PENELITIAN SKEMA ARTIKEL ILMIAH

#### JUDUL PENELITIAN

.....



Ketua Peneliti :  
Anggota Peneliti : 1.  
2.  
3. dst

PROGRAM STUDI DIPLOMA .....

JURUSAN .....

**POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

**TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN SKEMA ARTIKEL ILMIAH**

**Judul Penelitian** :  
Ketua Peneliti :  
NIDN/NUP :  
Jabatan Fungsional :  
Peneliti Anggota :

No.	Nama Peneliti Anggota	NIDN/NUP	Jabatan Fungsional
1.			
2.			
3.	dst		

Pelibatan Mahasiswa : ..... orang  
Objek Penelitian :  
Anggaran Biaya : Rp.  
Skema Penelitian : Artikel Ilmiah  
Target Luaran Penelitian :

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIDN.

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.  
NIP. 19851130 201101 2 012

# Judul Penelitian/Artikel Ilmiah

(Format Judul: Cambria, Masing-masing Kata dengan Huruf Kapital, Ukuran Huruf 16, *Bold*, Center, Spasi Antar Baris: Single)

**Peneliti1<sup>1\*</sup>, Peneliti2<sup>2</sup>**

(Cambria, 11, *Bold*, Center)

<sup>1</sup>Departemen, Fakultas, Institusi  
Alamat, Kota, Negara

<sup>2</sup>Departemen, Fakultas, Institusi  
Alamat, Kota, Negara  
(Cambria, 10, Normal, Center)

email penulis1@domain.ekstensi, <sup>2</sup>e-mail penulis2@domain.ekstensi

\* Corresponding author

(Cambria, 10, Normal, Center)

## **Abstract**

*Abstract tells the basic content of the article clearly and briefly, so it can be used as guidance for the readers in determining the level of its relevance towards their need in a short time. Abstract should be informative and give clear statement of the problem, approach or method used, and the result that shows the solution of the problem. Abstract should be between 100 to 200 words and is written in past tense and use standard nomenclature. It is suggested to use keywords that shows the body of knowledge or field related to the research.*

*(Justify, Cambria 11, single space, italic. Abstract contains of summary of the writing: the problem being discussed, approach or suggested solution and result of the solution/ conclusion. Abstract is between 100 to 200 words)*

**Keywords: font, paper, format**

*(keywords written in small characters except abbreviation, 3-6 words, separated by commas, Cambria, 11, Italic)*

## **Abstrak**

(Cambria, 12, *Bold, Italic, Center*)

*Abstrak menggambarkan konten utama dari artikel dengan jelas dan singkat, sehingga dapat dipakai sebagai panduan bagi pembaca dalam menentukan tingkat relevansinya terhadap kebutuhan mereka secara cepat. Abstrak harus informatif dan memberikan pernyataan yang jelas mengenai apa permasalahan yang ada, pendekatan atau metode yang digunakan, dan hasil yang menunjukkan solusi dari permasalahan tersebut. Panjang abstrak sebaiknya 100 sampai 200 kata. Tidak diharapkan menggunakan kutipan serta singkatan. Dianjurkan untuk menggunakan kata kunci yang menggambarkan bidang-bidang kajian yang terkait dengan penelitian.*

*(Justify, Cambria 11, spasi single, italic. Abstrak memuat ringkasan isi tulisan: permasalahan yang dibahas, pendekatan atau solusi yang diusulkan dan hasil dari solusi yang diajukan/simpulan. Abstrak berkisaran antara 100 sampai dengan 200 kata)*

**Kata kunci: huruf, jurnal, format**

*(kata-kata kunci ditulis huruf kecil, kecuali singkatan, antara 3-6 kata kunci, dipisahkan oleh koma, Cambria, 11, Italic)*

## **1. PENDAHULUAN**

*(judul bab ditulis dengan huruf capital, Cambria,12, Bold)*

Berikut ini adalah petunjuk penulisan dalam Proposal Penelitian Skema Artikel Ilmiah. Penulis bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap isi naskah yang ditulis. Isi naskah adalah karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan di media cetak atau *online* lain. [Cambria, 11, normal]

Naskah proposal ditulis dalam ukuran kertas A4 dengan jumlah halaman maksia 5 halaman, termasuk tabel dan gambar, serta dengan mengacu tata cara penulisan seperti yang

telah disusun pada tulisan ini.

Setiap pergantian paragraph tidak ada spasi satu baris kosong. Spasi antar baris untuk naskah adalah *single*. Penomoran *heading* dengan sistem Arabic dengan *sub-heading* maksimal hingga 3 tingkat.

Format isi naskah dibagi menjadi empat bagian. Adapun bagian-bagian tersebut terdiri dari:

- 1) Abstrak/ringkasan
- 2) Pendahuluan; berisi latar belakang masalah penelitian
- 3) Tinjauan Pustaka, berisi kajian teori/penelitian terdahulu yang relevan
- 4) Metode Penelitian; berisi metode yang digunakan untuk menganalisa masalah.

Persamaan atau formula ditulis dengan menyertakan nomor persamaan secara berurutan menggunakan angka arab dalam kurung.

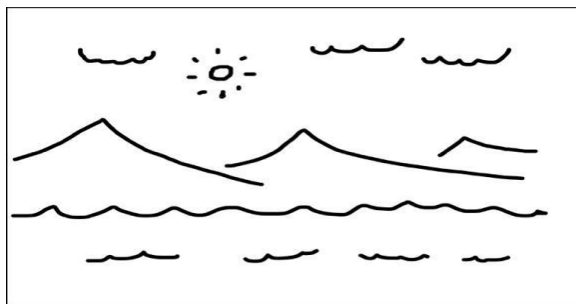
Tabel dan gambar dimuat dengan format satu kolom dan harus diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1: atau Gambar 1., dst.). Judul tabel ditulis diatas tabel dengan posisi rata tengah (*centered*). Penulisan nomor tabel diikuti dengan tanda titik dua (:). Judul gambar diletakkan dibawah gambar dengan posisi tengah (*centered*). Penulisan nomor gambar diikuti oleh tanda titik kemudian judul dari gambar. Ukuran huruf Cambria yang digunakan adalah 9 dan posisi tulisan di tengah (*centered*). Setiap keterangan tabel dan gambar agar dilengkapi dengan sumber atau rujukannya.

Tabel 1: Judul Tabel

[Sumber: ]

(Cambria,10, normal, penulisan sumber diawali dan diakhiri oleh kurung siku)

No.	Nama Responden	Jawaban Angket				
		a	B	C	d	abstein
1.						
2.						
3.						
Jumlah						



Gambar 1. Judul Gambar

[Sumber: ]

(Cambria,10, normal, penulisan sumber diawali dan diakhiri oleh kurung siku)

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat penjelasan tentang kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan

## 3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang tahap-tahap penelitian yang menggambarkan urutan logis untuk mendapatkan output penelitian sesuai dengan harapan.

### Referensi

(tanpa ada nomor dan ditulis huruf capital, Cambria, 12, bold)

Penulisan pustaka menggunakan "APA Style". Acuan pustaka ditulis urut dan semua yang



tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam tulisan atau paper. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai daftar pustaka yang digunakan, antara lain:

- 1) Referensi yang digunakan minimal berjumlah 10 dengan sumber rujukan primer sebesar 80%, dan 20% sumber rujukan skunder.
- 2) Penulisan referensi wajib menggunakan software pengelola referensi salah satunya MENDELEY.
- 3) Standar penulisan daftar pustaka berdasarkan metode penulisan "APA Publication Manual (6th edition)" dengan urutan artikel/ pustaka dari yang paling pertama muncul (dikutip) di artikel ini hingga yang paling akhir dengan penjabaran sebagai berikut:

Contoh

### **Artikel Jurnal**

- Abor, J., & Bokpin, G. A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy. *Studies in Economics and Finance*, 27(3), 180–194. <https://doi.org/10.1108/10867371011060018>
- Anwar, R., Darmawan, D., & Setiawan, C. (2016). Kajian Kitab Tafsir dalam Jaringan Pesantren di Jawa Barat. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 56–69. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.578>
- Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. *Industrial Marketing Management*, 36(2), 230–240. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.08.013>
- Rahmawati, R., Yahiji, K., & Rusli, M. (2019). Mopo'alati Tradition In The Coastal Muslim Community At Molotabu Beach Bone Bolango District. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 4(1), 65–79. <https://doi.org/10.15575/jw.v4i1.4080>
- Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.2307/3003485>

### **Buku**

- Aizid, R. (2016). *Biografi Ulama Nusantara*. Diva Press.

### **Artikel Dari Internet**

- Nugrahanto, A. D. (2015). *Blusukan Dalam Sejarah : Dari Sambernyawa sampai Jokowi*. Kompasiana. Retrieved from [https://www.kompasiana.com/anton\\_djakarta/552a6008f17e61f003d623a6/blusukan-dalam-sejarah-dari-sambernyawa-sampai-jokowi](https://www.kompasiana.com/anton_djakarta/552a6008f17e61f003d623a6/blusukan-dalam-sejarah-dari-sambernyawa-sampai-jokowi)

Lampiran 2. Format Substansi Proposal Penelitian Skema Rekognisi Tugas Akhir

**PROPOSAL PENELITIAN**  
**SKEMA REKOGNISI TUGAS AKHIR**

**JUDUL PENELITIAN**

.....



Ketua Peneliti :  
Anggota Peneliti : 4.  
5.  
6. dst

**PROGRAM STUDI DIPLOMA .....**

**JURUSAN .....**

**POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

**TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN SKEMA REKOGNISI TUGAS AKHIR**

**Judul Tugas Akhir** :

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Dosen Pembimbing :

No.	Nama Dosen Pembimbing	NIDN/NUP	Pembimbing I/II
1.			
2.			

Objek Penelitian :

Anggaran Biaya : Rp.

Skema Penelitian : Rekognisi Tugas Akhir

Target Luaran Penelitian :

Peneliti,

(Nama Lengkap)  
Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

Menyetujui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.  
NIP. 19851130 201101 2 012

**JUDUL TUGAS AKHIR**  
**Nama Peneliti<sup>1</sup>, Dosen Pembimbing I<sup>2</sup>, Dosen Pembimbing II<sup>3</sup>**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Rumusan Masalah
- 1.4. Tujuan Penelitian
- 1.5. Manfaat Hasil Penelitian
  1. Manfaat Teoritis
  2. Manfaat Praktis
- 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

- 2.1 Kajian Teoritis
- 2.2 Penelitian Terdahulu
- 2.3 Kerangka Pemikiran/Model Penelitian
- 2.4 Hipotesis Penelitian/Proposisi (bila ada)

**BAB III METODE PENELITIAN**

- 3.1 Desain Penelitian
- 3.2 Subyek Penelitian/Populasi/Sampel Penelitian
- 3.3 Variabel Penelitian
- 3.4 Metode Pengumpulan Data
  1. Instrumen Penelitian
  2. Validasi Instrumen Penelitian
  3. Prosedur Pengumpulan Data
- 3.5 Metode Analisis Data
  1. Sumber Data
  2. Jenis Data
  3. Struktur Data
  4. Prosedur Analisis Data

**Lampiran 3. Format Substansi Proposal Penelitian Skema Paten Sederhana**

**PROPOSAL PENELITIAN  
SKEMA PATEN SEDERHANA**

**JUDUL PENELITIAN**

.....



Ketua Peneliti :  
Anggota Peneliti : 1.  
2.  
3. dst

**PROGRAM STUDI DIPLOMA .....**  
**JURUSAN .....**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BALI**  
**TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN SKEMA PATEN SEDERHANA**

**Judul Penelitian** :

Ketua Peneliti :

NIDN/NUP :

Jabatan Fungsional :

Peneliti Anggota :

No.	Nama Peneliti Anggota	NIDN/NUP	Jabatan Fungsional
1.			
2.			
3.	dst		

Pelibatan Mahasiswa : ..... orang

Objek Penelitian :

Anggaran Biaya : Rp.

Skema Penelitian : Paten Sederhana

Target Luaran Penelitian : N/A

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIDN.

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.  
NIP. 19851130 201101 2 012

Deskripsi

**JUDUL INVENSI**

5 **Bidang Teknik Invensi**

    Invensi ini mengenai ..... (**Judul Invensi**).....  
....., lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan ..... (**Penjelasan Judul Invensi**).

10

**Latar Belakang Invensi**

    Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk .....

15

.....  
Invensi teknologi yang berkaitan dengan ..... juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten ..... Nomor ..... Tanggal ..... dengan judul ..... dimana diungkapkan ....., namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan .....

20

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten ..... Nomor ..... tanggal ..... dengan judul..... dimana diungkapkan.....  
.....

25

Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah .....

30

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara .....

### **Uraian Singkat Invensi**

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya

5 khususnya ..... (*Judul Invensi*), dimana suatu (*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini terdiri dari ..... a, ..... b, ..... c, yang dicirikan dengan ..... (*Dapat dipakai sebagai klaim*).

10 Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

.....  
Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada  
15 gambar-gambar yang menyertainya.

### **Uraian Singkat Gambar**

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari..... (*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, adalah blok diagram .....

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart) ..... dst.

### **Uraian Lengkap Invensi**

25 Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... (*Judul Invensi*),

yang terdiri dari..... (**diuraikan secara lengkap mengacu**  
30 pada gambar 1).

Mengacu pada Gambar 2, ..... (**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2**)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.



Mengacu pada gambar 1 hingga gambar .....(**sesuai dengan jumlah gambar**)..... **jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

5 Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi ..... karena secara praktis dan efisien..... (**sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensitersebut**) ..... dan invensi ini benar- benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis  
10 khususnya pada.....**Judul Invensi**).

15

20

25

30

**Klaim**

1. Suatu **(Judul invensi)**.....yang terdiri  
(1)....., (2)....., dst, yang  
5 dicirikan dengan .....

2. **(Judul invensi)** sesuai dengan klaim 1,dimana  
.....(merupakan klaim turunan dan penjelasandari yang  
tercakup pada klaim 1).....  
10

3. **(Judul invensi)**, dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang  
dinginkan.  
15

20

25

30

35

Abstrak

**JUDUL INVENSI**

5            Invensi ini mengenai..... (***gabungan bidang teknik  
invensi dan ringkasan invensi tidak boleh lebih dari  
200kata***)

10

15

20

**Lampiran 4. Format proposal pengabdian kepada masyarakat**

**PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(Times New Roman 12, BOLD)**

**JUDUL PkM (Times New Roman 14, BOLD)**



logo dibuat absolut (*lock aspect ratio*) panjang 5.5cm

**OLEH:  
TIM PRODI (D.IV) DESTINASI PARIWISATA  
(Times New Roman 12, BOLD)**

**(Times New Roman 12, BOLD)  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(Times New Roman 12, BOLD)**



logo dibuat absolut (*lock aspect ratio*) panjang 5.5cm

**JUDUL PkM (Times New Roman 12, BOLD)**

**Nusa Dua, 1 Januari 2024**

Ketua Jurusan Kepariwisataan

Koordinator Program Studi  
(Destinasi Pariwisata)

**Nama Lengkap**  
NIP

**Nama Lengkap**  
NIP

Menyetujui  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.**  
NIP. 19851130 201101 2 012

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**MITRA PROGRAM**  
(Times New Roman 12, BOLD)

**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
(Times New Roman 12, BOLD)



logo dibuat absolut (*lock aspect ratio*) panjang 5.5cm

**JUDUL PkM (Times New Roman 12, BOLD)**

Kegiatan ini telah disetujui oleh :

Desa Sukawati, April 2024

Perbekel Desa Sukawati

**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Judul Kegiatan :

Pembina :

Penanggung Jawab : 1.  
2.

Ketua Pelaksana :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Fasilitator : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.

Sekretariat : 1.  
2.  
3.

Mahasiswa : 1.  
2.  
3.

Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat :

Jangka Waktu Pelaksanaan :

Tanggal Pelaksanaan :

IKU : 1.  
2.

Ketua Jurusan Kepariwisataan

Koordinator Program Studi  
(Destinasi Pariwisata)

**Nama Lengkap**  
NIP

**Nama Lengkap**  
NIP

Menyetujui  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.**  
NIP. 19851130 201101 2 012

**Kata Pengantar**  
**(Times New Roman 12, spasi 1.5)**



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... i

Usulan proposal pengabdian masyarakat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format proposal PkM menggunakan rujukan artikel yang akan dituju untuk publikasi
2. Contoh format dibawah merupakan artikel Makardhi
3. Proposal di mulai dari Abstrak, Pendahuluan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya + Laporan Perjalanan Dinas Penjajagan yang dilengkapi Foto
4. Tulisan jenis Times New Roman ukuran 12
5. Jarak baris 1,5 spasi (kecuali halaman judul dan daftar pustaka ditulis satu spasi)
6. Ukuran kertas A4
7. Margin 3-3-3-3

\*\*\*\*\*

## Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem.

Hartanti Woro Susianti<sup>1</sup>, Dewa Ayu Made Lily Dianasari<sup>2\*</sup>, Ni Made Tirtawati<sup>3</sup>, Hanugerah Kristiono Liestiandre<sup>4</sup>, Ida Bagus Putra Negarayana<sup>5</sup>, Luh Nyoman Tri Lilasari<sup>6</sup>, I Gede Made Sukariyanto<sup>7</sup>, Dewa Ayu Nyoman Aridayanti<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Program Studi Manajemen Kepariwisataan, Politeknik Pariwisata Bali  
Jl. Dharmawangsa Kampial, Nusa Dua Bali, Telp: (0361) 773537

<sup>1</sup>worosusianti@ppb.ac.id, <sup>2</sup>\*lily.dianasari@gmail.com, <sup>3</sup>tirtastp@yahoo.co.id, <sup>4</sup>hanugerah@ppb.ac.id, <sup>5</sup>negarayana@ppb.ac.id, <sup>6</sup>trililasari\_ila@ppb.ac.id, <sup>7</sup>[made.sukariyanto@ppb.ac.id](mailto:made.sukariyanto@ppb.ac.id), <sup>8</sup>rid@ppb.ac.id  
\*Corresponding author

Received: February, 2023

Accepted: Juni 2023

Published: Juni 2023

### **Abstract**

*The Dukuh Penaban Traditional Village was the chosen location for community service in the Tourism Management Study Program because in Dukuh Penaban there has not been good governance in terms of developing a tourist village. There are still some conditions where local people are not ready to provide services for tourists who come, because there is no clear management system. This community service is therefore, carried out in the form of Tourism Village Management Training, with participants from all stakeholders in the Dukuh Penaban Tourism Village. The outputs of this activity are: The increase of public understanding of the tourism village governance system, the formation of a tourism governance system managed by a professional management agency in the Dukuh Penaban Traditional Village area that accommodates the aspirations of the local community, as well as the increase of community capability in providing excellent service for tourists, thus making Dukuh Penaban a favorite destination in Karangasem Regency. It is highly expected that this activity will provide benefits in the form of increasing human resources from the Dukuh Penaban Tourism Village who are skilled and independent in managing tourism potential in their area in a sustainable manner.*

**Keywords:** *tourism village, governance, Dukuh Penaban*

### **Abstrak**

*Desa Adat Dukuh Penaban terpilih sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat Prodi. MKP karena di Dukuh Penaban belum terbentuk tata kelola yang baik dalam hal pengembangan desa wisata. Masih terdapat beberapa kondisi masyarakat lokal yang belum siap memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang, karena belum adanya system pengelolaan yang jelas. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, dengan peserta seluruh pemangku kepentingan di Desa Wisata Dukuh Penaban. Output dari kegiatan ini adalah: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem tata kelola desa wisata, terbentuknya sistem tata kelola pariwisata yang dikelola oleh suatu lembaga badan pengelola profesional di wilayah Desa Adat Dukuh Penaban yang mengakomodir aspirasi masyarakat lokal, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, sehingga menjadikan Dukuh Penaban sebagai destinasi favorit di Kabupaten Karangasem. Dengan kegiatan*

ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa meningkatnya SDM dari Desa Wisata Dukuh Penaban yang terampil dan mandiri dalam mengelola potensi wisata di daerahnya secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** desa wisata, tata kelola, Dukuh Penaban

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (*communitybased tourism*) adalah sebuah konsep yang menekankan masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal merupakan paradigma yang sangat penting dalam kerangka pengembangan dan atau pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata. Tiga kegiatan pariwisata yang mendukung konsep CBT yaitu penjelajah (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural tourism*), dan ekowisata (*ecotourism*).

Konsep yang digunakan dalam CBT sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan, dimana masyarakat diberdayakan terlebih dahulu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri dan dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (*self help*), sehingga masyarakat mampu mengelola desanya sendiri (Listiandre, dkk., 2021).

Wujud dari konsep *community based tourism* (C B T) adalah dikembangkannya desa-desa wisata, dimana masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusianya. Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah dengan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut (Susianti, dkk., 2022).

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, dengan sekelompok kecil wisatawan yang tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Sedangkan Nuryanti (2012) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik

Salah satu desa wisata yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem adalah Desa Wisata Dukuh Penaban, yang mulai dikembangkan sejak tahun 2017 dengan menawarkan atraksi berupa pemandangan yang indah dan keunikan budaya turun temurun yang masih terjaga. Untuk menikmati keindahan alam, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Di tempat ini, wisatawan bisa berpetualang dengan melintasi jalur trekking alami berupa sawah yang luas, dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke puncak Bukit Jongkok. Dari atas bukit ini, wisatawan bisa menyaksikan secara langsung pantai serta laut yang ada di sekitar Karangasem, dan juga pemandangan Gunung Agung. Selain itu wisatawan dapat berkunjung ke Museum Lontar, dimana wisatawan dapat mempelajari seni membaca lontar yang merupakan salah satu tradisi di masa lalu. Wisatawan juga dapat belajar mengenai cara membuat surat lontar.

Sebagai aktivitas wisata kuliner yang unik di Desa Wisata Dukuh Penaban, wisatawan bisa mencicipi lawar don jepun, yang dibuat dengan bahan utama daun kamboja. Lawar don jepun ini menjadi kuliner unik di Desa Dukuh Penaban tidak hanya karena kelezatannya, tetapi juga mempunyai nilai sejarah penting. Eksistensinya memiliki hubungan penting dengan pembangunan Pura Puseh Dukuh Penaban yang berlangsung pada tahun 1658. Pada proses pembangunannya itu, warga desa berbondong-bondong melakukan pembangunan pura secara gotong royong. Mereka pun turut membawa menu berupa nasi serta lawar don jepun.

Desa Dukuh Penaban merupakan sebuah desa wisata yang pengembangannya baru dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengukuhan desa ini sebagai desa wisata juga baru dilakukan pada tahun 2017. Pada acara pengukuhan tersebut, masyarakat setempat

menampilkan tarian sakral yang disebut dengan Tari Kupu-Kupu Kuning. Tarian ini merupakan salah satu jenis tari tradisional Bali yang memiliki makna penting. Biasanya pementasan Tari Kupu-Kupu Kuning dilakukan oleh para pria dan dipentaskan padapiodalan. Gerakan tarian juga begitu beda dibandingkan dengan tarian lain, menggunakan pakaian serba kuning, kipas, serta keris.

Langkah Desa Adat Dukuh Penaban Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang dengan inovasinya sendiri telah membangun desanya sendiri sebagai desa wisata ini, pantas diapresiasi. Berbagai penghargaan telah mereka raih, diantaranya adalah Juara Pokdarwis tingkat provinsi Bali 2019, Juara Lomba Silpakara Nugraha 2019, memperoleh Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2019, Juara Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional Sustainable Tourism Award, Pokdarwis kategori Mandiri 2019, memperoleh Penghargaan MURI sebagai Desa Adat pertama yg membangun Museum Pustaka Lontar 2020, dan Apresiasi Markplus Tourism, kategori Entrepreneurial Destination Award tahun 2021.

Meskipun telah dibangun dan melakukan aktivitas pariwisata sejak tahun 2017, namun pengakuan sebagai Desa Wisata bagi Desa Adat Dukuh Penaban baru dikukuhkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Bupati Karangasem Nomor 205/HK/2022 tentang Penetapan 6 Desa Wisata di Kabupaten Karangasem, yang salah satunya adalah Desa Adat Dukuh Penaban.

Desa Wisata Dukuh Penaban ini dikelola oleh Desa Adat Dukuh Penaban yang dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) setempat. Ketua POKDARWIS, Bapak I Nengah Sudana, yang dibantu oleh anggota kelompok pokdarwis lainnya, berperan sangat besar dalam pengembangan pariwisata di Dukuh Penaban. Semangat POKDARWIS Dukuh Penaban sangatlah tinggi dalam mendorong masyarakat setempat untuk bekerjasama atas pengembangan desa wisata, dengan cara mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan tetap menjaga keasrian alam Dukuh Penaban, dan ikut terlibat dalam industri pariwisata, guna meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjadi *guide*, berwirausaha seperti membuat warung makan, menjadikan rumahnya sebagai *guest house*, dan lain lain.

Adapun alasan kuat mengapa Desa Adat Dukuh Penaban dipilih sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat Program Studi MKP, dikarenakan saat ini di Dukuh Penaban belum terbentuk tata kelola yang baik dalam hal pengembangan desa wisata. Masih terdapat beberapa kondisi masyarakat lokal yang belum siap memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang dikarenakan belum adanya system pengelolaan yang jelas.

Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan bahwa tata kelola desa wisata merupakan cara untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan maka pengelola wajib melakukan manajemen sumberdaya yang efektif. Manajemen sumberdaya digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan. Longjit dan Pearce (2013) membagi tata kelola desa wisata ke dalam tiga bagian yakni tujuan, aktifitas atau kegiatan dan struktur desa wisata. Tujuan diartikan sebagai sasaran atau target yang akan dicapai suatu desa dalam menjalankan suatu program pariwisata. Sasaran ini dituangkan dalam bentuk tujuan (*goals*) yang hendak dicapai pada periode tertentu. Sedangkan aktifitas dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tata kelola desa wisata. Umumnya, tata kelola desa wisata senantiasa menitikberatkan pada pentingnya mendorong masyarakat mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata serta pelestarian sumber-sumber pariwisata yang dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, pengelola dan tokoh masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban mengaku belum siap dengan tata kelola desanya sebagai desa wisata. Disisi lain, kondisi pascapandemic Covid-19 merupakan momentum untuk menyiapkan segala hal terkait pengembangan desa wisata. Kondisi ini pun menuntut setiap desa wisata agar mampu memberikan pelayanan berdasarkan protokol kesehatan. Sehingga, ketika nanti desa wisatatelah siap, desa wisata Dukuh Penaban dapat menjadi pilihan untuk dikunjungi wisatawan dan mampu memperoleh manfaat yang positif bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan secara terus menerus terutama dari pihak akademisi (Prodi. MKP) guna membentuk keterampilan masyarakat agar mandiri dalam mengelola potensi desa wisata secara

berkelanjutan.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan Tahap pertama dari serangkaian kegiatan pendampingan bagi *stakeholder* pariwisata di wilayah Dukuh Penaban. yang berbentuk pelatihan dengan judul “Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem”. Kegiatan pelatihan ini memfokuskan pengelolaan sebuah desa wisata dan mendengarkan pemaparan serta rencana pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban, yang dievaluasi oleh pembahas, apa yang perlu dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan desa wisata dan apa yang dipandang perlu untuk diperbaiki pada pengelolaan saat ini.

Materi pertama diberikan oleh narasumber dari Poltekpar Bali, Ni Made Tirtawati, S.Si.,M.Par. dengan tema Potensi Desa Wisata. Materi kedua dengan tema Best Practise Desa Wisata Munggu, disampaikan oleh narasumber Ketua Pokdarwis Desa Wisata Munggu, I Putu Suada. Sedangkan materi ketiga disampaikan oleh narasumber dari Poltekpar Bali Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si., mengenai Tata Kelola Desa Wisata.

Kegiatan ini dilaksanakan di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban, pada hari Jum’at dan Sabtu, 17 dan 18 September 2022, dan diikuti oleh Perbekel Dukuh Penaban, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Kelian Subak, Pokdarwis, anggota PKK, dan Pelaku Wisata seperti pemilik akomodasi, pemilik restoran, pemilik usaha transportasi lokal di Dukuh Penaban, yang berjumlah 30 orang.

Adapun *output* yang diharapkan setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan antara lain: 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem tata kelola desa wisata. 2) Terbentuknya sistem tata kelola pariwisata yang dikelola oleh suatu lembaga badan pengelola profesional di wilayah Desa Adat Dukuh Penaban yang mengakomodir aspirasi masyarakat lokal, dan 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan sehingga menjadikan Dukuh Penaban sebagai destinasi favorit di Kabupaten Karangasem.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Daftar Pustaka merujuk pada aturan penulisan dari APA (<https://apastyle.apa.org>). Disarankan menggunakan *Reference Manager*.

### **Contoh:**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Imam Baihaqi. (2019). *Desa Wisata Dukuh Penaban, Pilihan Tempat Liburan Baru dengan Aktivitas Unik*. Kintamani ID. Retrieve from <https://www.kintamani.id/desa-wisata-dukuh-penaban-pilihan-tempat-liburan-baru-dengan-aktivitas-unik/>
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach..* New York : Van Nostrand Reinhold.

- Jadesta (2022), *Desa Wisata Dukuh Penaban*, Retrieved from [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dukuh\\_penaban](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dukuh_penaban)
- Latip, N. A., Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Marzuki, A., & Umar, M. U. (2018). Indigenous residents' perceptions towards tourism development: a case of Sabah, Malaysia. *Journal of Place Management and Development*. 11 (4). 391 – 410. <http://doi.org/10.1108/jpmd-09-2017-0086>
- Lekaota, L. (2015). The importance of rural communities' participation in the management of tourism management. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. 7 (5). 453 – 462. <https://doi.org/10.1108/whatt-06-2015-0029>
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*. 5(3). 248 – 262. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-08-2014-0027>
- Listiandre, H.K, dkk. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Berbasis CHSE di Desa BakasKabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*. 1 (2). 106 – 114. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v1i2.581>
- Longjit, C. & D. Pearce. (2013). Managing a Mature Coastal Destination: Pattaya Thailand. *Semantic Scholar*. <https://doi.org/10.1016/I.JDMM.2013.05.002>
- Mertha, I Wayan. (2022). *Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Adat*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata Dukuh Penaban Kabupaten Karangasem. Pengabdian kepada Masyarakat Prodi. Manajemen Kepariwisataaan Poltekpar Bali.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges*, Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pitana, I G., & Diarta, I K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suharto (2006). *Buku panduan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Berbasis Pendampingan*. Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.
- Susianti, H.W. dkk. (2022). Penguatan Storytelling Produk Wisata Bakas Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*. 2 (1). 54 - 61. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v2i1.766>
- Tim Prodi. Manajemen Kepariwisataaan (2022). *Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekpar Bali: Laporan Kegiatan PKM.
- Tirtawati, N. M. 2022. *Menggali Potensi Sumberdaya Pariwisata*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata Dukuh Penaban Kabupaten Karangasem. Pengabdian kepada Masyarakat Prodi. Manajemen Kepariwisataaan Poltekpar Bali.

## RENCANA ANGGARAN BIAYA.

### Rencana Anggaran Biaya

Berisi keterangan alat dan bahan, jumlah, dan harga yang diperlukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Anggaran yang diajukan terdiri dari komponen-komponen yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam DIPA 2024 dan kebutuhan untuk kegiatan PkM. Berikut terlampir format RAB PkM.

#### Contoh RAB

Skema Program Studi

Panitia : 12 (Dosen dan Tendik) serta 3 Mahasiswa

Lokus : Kab. Gianyar

	<i>Pelaksanaan Pengabdian Kelompok</i>					<b>55.585.000</b>
521211	<u>Belanja Bahan</u>					<b>18.000.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Konsumsi peserta [30 ORG x 2 KL x 1 KEG]	60	OK	48.000		2.880.000
	- Snack peserta [30 ORG x 3 KL x 1 KEG]	90	OK	21.000		1.890.000
	- Konsumsi panitia [15 ORG x 3 KL x 1 KEG]	45	OK	48.000		2.160.000
	- Snack panitia [15 ORG x 3 KL x 1 KEG]	45	OK	21.000		945.000
	- Kaos [45 ORG x 1 KL x 1 KEG]	45	PCS	125.000		5.625.000
	- Seminar Kit [30 BH x 1 KL x 1 KEG]	30	BH	75.000		2.250.000
	- Penggandaan Laporan [3 LAP x 1 KL x 1 KEG]	3	LAP	50.000		150.000
	- Spanduk [2 BH x 1 KL x 1 KEG]	2	BH	300.000		600.000
	- Publikasi [1 PKT x 1 KL x 1 KEG]	1	PKT	1.500.000		1.500.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>					<b>4.000.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Sewa Gedung [1 UNIT x 2 HR x 1 KEG]	2	HR	2.000.000		4.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>					<b>2.400.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2	OJ	1.200.000		2.400.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					<b>31.185.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	> Penjajagan Gianyar					<b>2.560.000</b>
	- Uang Harian [4 ORG x 1 HR x 1 KEG]	4	OH	190.000		760.000
	- Transport [4 ORG x 2 KL x 1 KEG]	8	OK	225.000		1.800.000
	> Paket Perjalanan Dinas Pelaksanaan					
	>> Bali					<b>28.625.000</b>
	- Akomodasi [8 KMR x 2 MLM x 1 KEG]	16	MLM	650.000		10.400.000
	- Uang Harian Panitia Hari 1 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	190.000		2.280.000
	- Uang Harian Panitia Hari 2 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	160.000		1.920.000
	- Uang Harian Panitia Hari 3 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	115.000		1.380.000
	- Transportasi Panitia Gianyar PP [12 ORG x 2 KL x 1 KEG]	24	OK	225.000		5.400.000
	- Uang Harian Panitia Mahasiswa Hari 1 [3 ORG x 1 HR x 1 KEG]	3	OH	190.000		570.000
	- Transportasi Panitia Mahasiswa Gianyar PP [3 ORG x 2 KL x 1 KEG]	6	OK	112.500		675.000
	- Transport Peserta [30 ORG x 2 HR x 1 KEG]	60	OK	100.000		6.000.000



Catatan :

1. Untuk pengajuan Belanja Bahan PkM dapat diajukan sesuai kebutuhan yang diperlukan.
2. Jumlah Dosen, Tendik dan Mahasiswa disesuaikan dengan jumlah sesungguhnya.
3. Lokus PkM mengacu pada pengentasan kemiskinan antara lain: Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kab. Tabanan dan Kab. Jembrana
4. Berikut merupakan daftar transportasi lokal :

a.	Kab. Gianyar PP	Rp. 225.000 x 2
b.	Kab. Karangasem PP	Rp. 263.000 x 2
c.	Kab. Buleleng PP	Rp. 265.000 x 2
d.	Kab. Tabanan PP	Rp. 225.000 x 2
e.	Kab. Jembrana PP	Rp. 270.000 x 2

**Lampiran 5. Format Laporan Akhir Penelitian**

**LAPORAN PENELITIAN**  
**SKEMA ARTIKEL ILMIAH/PATEN SEDERHANA/REKOGNISI TUGAS AKHIR\***  
\*pilih salah satu

**JUDUL PENELITIAN**

.....



Ketua Peneliti :  
Anggota Peneliti : 7.  
8.  
9. dst

**PROGRAM STUDI DIPLOMA .....**  
**JURUSAN .....**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BALI**  
**TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL**  
**PENELITIAN SKEMA ARTIKEL ILMIAH/PATEN SEDERHANA/REKOGNISI**  
**TUGAS AKHIR**

**Judul Penelitian** :

Ketua Peneliti :

NIDN/NUP :

Jabatan Fungsional :

Peneliti Anggota :

No.	Nama Peneliti Anggota	NIDN/NUP	Jabatan Fungsional
1.			
2.			
3.	dst		

Pelibatan Mahasiswa : ..... orang

Objek Penelitian :

Rencana Anggaran Biaya : Rp.

Skema Penelitian : Artikel Ilmiah/Paten Sederhana/Rekognisi Tugas Akhir

Target Luaran Penelitian :

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIDN.

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.  
NIP. 19851130 201101 2 012

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN**  
**PENELITIAN SKEMA ARTIKEL ILMIAH/PATEN SEDERHANA/REKOGNISI**  
**TUGAS AKHIR**

**Judul Penelitian** :

Ketua Peneliti :

NIDN/NUP :

Jabatan Fungsional :

Peneliti Anggota :

No.	Nama Peneliti Anggota	NIDN/NUP	Jabatan Fungsional
1.			
2.			
3.	dst		

Pelibatan Mahasiswa : ..... orang

Objek Penelitian :

Realisasi Biaya : Rp.

Skema Penelitian : Artikel Ilmiah/Paten Sederhana/Rekognisi Tugas Akhir

Target Luaran Penelitian :

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIDN.

(Nama Lengkap dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.  
NIP. 19851130 201101 2 012

**NASKAH FINAL  
ARTIKEL ILMIAH/PATEN SEDERHANA/REKOGNISI TUGAS AKHIR**

**BUKTI SUBMIT**

**Bukti submit naskah penelitian ke Jurnal/DJKI (print screen submission/email berhasil submit, untuk Tugas Akhir dengan menyertakan lembar pengesahan Tugas Akhir**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**(gambar proses penelitian, disertai keterangan foto singkat dibawah foto)**

**SCAN LETTER OF ACCEPTANCE PENELITIAN**



**FOTOCOPY SK PENELITIAN**

## SPTJM KEGIATAN PENELITIAN

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan Fungsional :  
Alamat : Politeknik Pariwisata Bali

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pada hari **Kamis, 9 November 2023**(\*tanggal berlaku pada SK penelitian) telah dilaksanakan kegiatan Penelitian Individu/ Kelompok dengan judul Penelitian “”.
2. Dari kegiatan tersebut menghabiskan biaya-biaya yang telah saya keluarkan, dan telah saya hitung dengan benar berdasarkan hak kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada saya sejumlah **Rp. 8,000,000 (Delapan Juta Rupiah)** sesuai nota dan rekap terlampir.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan/mengembalikan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke rekening Kas Negara, dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Nusa Dua, **13 November 2023**  
Ketua Pelaksana Kegiatan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
NIP: -

**SCAN RAB KEGIATAN PENELITIAN YANG SUDAH DIACC**

**REALISASI KEGIATAN (format dapat diunduh [disini](#))**

**DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA**, seperti

- ST, Laporan Penugasan dan Bukti Verifikasi Laporan Penugasan (bila menggunakan anggaran Perjalanan Dinas)
- Dokumen pendukung realisasi kegiatan lainnya yang sesuai dengan nota realisasi anggaran

**Lampiran 6. Format laporan akhir pengabdian kepada masyarakat**

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI INTERNASIONAL  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI IN COLLABORATION FOR THE 2ND UN  
TOURISM OF WOMAN EMPOWERMENT INTOURISM IN ASIA AN THE  
PASIFIC**

**GREEN ACTION: CARBON FOOTPRINT OFFSETTING**



**OLEH:  
TIM PANITIA GREEN ACTION: CARBON  
FOOTPRINT OFFSETTING**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(Times New Roman 12, BOLD)**



logo dibuat absolut (*lock aspect ratio*) panjang 5.5cm

**JUDUL PkM (Times New Roman 12, BOLD)**

**Nusa Dua, 1 Januari 2024**

Ketua Jurusan Kepariwisataan

Koordinator Program Studi  
(Destinasi Pariwisata)

**Nama Lengkap**

NIP

**Nama Lengkap**

NIP

Menyetujui  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.**

NIP. 19851130 201101 2 012

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**MITRA PROGRAM**  
**(Times New Roman 12, BOLD)**

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(Times New Roman 12, BOLD)**



logo dibuat absolut (*lock aspect ratio*) panjang 5.5cm

**JUDUL PkM (Times New Roman 12, BOLD)**

Kegiatan ini telah disetujui oleh :

Desa Sukawati, April 2024

Perbekel Desa Sukawati



**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Judul Kegiatan :

Pembina :  
Penanggung Jawab : 1.  
2.

Ketua Pelaksana :  
Wakil Ketua :  
Sekretaris :  
Fasilitator : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.

Sekretariat : 1.  
2.  
3.

Mahasiswa : 1.  
2.  
3.

Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat :  
Jangka Waktu Pelaksanaan :  
Tanggal Pelaksanaan :  
IKU : 1.  
2.

Ketua Jurusan Kepariwisataan	Koordinator Program Studi (Destinasi Pariwisata)
<u><b>Nama Lengkap</b></u> NIP	<u><b>Nama Lengkap</b></u> NIP
Menyetujui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  <u><b>Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.</b></u> NIP. 19851130 201101 2 012	

**Kata Pengantar**  
**(Times New Roman 12, spasi 1.5)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

Usulan proposal pengabdian masyarakat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format Laporan PkM menggunakan rujukan artikel yang akan dituju untuk publikasi
2. Contoh format dibawah merupakan artikel Makardhi
3. Laporan di mulai dari Abstrak, Pendahuluan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan Daftar Pustaka, dengan Lampiran Realisasi Anggaran + Dokumentasi Kegiatan lengkap dengan judul
4. Tulisan jenis Times New Roman ukuran 12
5. Jarak baris 1,5 spasi (kecuali halaman judul dan daftar pustaka ditulis satu spasi)
6. Ukuran kertas A4
7. Margin 3-3-3-3

\*\*\*\*\*

## Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem.

Hartanti Woro Susianti<sup>1</sup>, Dewa Ayu Made Lily Dianasari<sup>2\*</sup>, Ni Made Tirtawati<sup>3</sup>, Hanugerah Kristiono Liestiandre<sup>4</sup>, Ida Bagus Putra Negarayana<sup>5</sup>, Luh Nyoman Tri Lilasari<sup>6</sup>, I Gede Made Sukariyanto<sup>7</sup>, Dewa Ayu Nyoman Aridayanti<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Program Studi Manajemen Kepariwisata, Politeknik Pariwisata Bali  
Jl. Dharmawangsa Kampial, Nusa Dua Bali, Telp: (0361) 773537

1worosusianti@ppb.ac.id, 2\*lily.dianasari@gmail.com, 3tirtastp@yahoo.co.id, 4hanugerah @ppb.ac.id, 5negarayana@ppb.ac.id, 6trililasari\_ila@ppb.ac.id, 7made.sukariyanto@ppb.ac.id, 8rid@ppb.ac.id

\*Corresponding author

Received: February, 2023

Accepted: Juni 2023

Published: Juni 2023

### **Abstract**

*The Dukuh Penaban Traditional Village was the chosen location for community service in the Tourism Management Study Program because in Dukuh Penaban there has not been good governance in terms of developing a tourist village. There are still some conditions where local people are not ready to provide services for tourists who come, because there is no clear management system. This community service is therefore, carried out in the form of Tourism Village Management Training, with participants from all stakeholders in the Dukuh Penaban Tourism Village. The outputs of this activity are: The increase of public understanding of the tourism village governance system, the formation of a tourism governance system managed by a professional management agency in the Dukuh Penaban Traditional Village area that accommodates the aspirations of the local community, as well as the increase of community capability in providing excellent service for tourists, thus making Dukuh Penaban a favorite destination in Karangasem Regency. It is highly expected that this activity will provide benefits in the form of increasing human resources from the Dukuh Penaban Tourism Village who are skilled and independent in managing tourism potential in their area in a sustainable manner.*

**Keywords:** *tourism village, governance, Dukuh Penaban*

### **Abstrak**

*Desa Adat Dukuh Penaban terpilih sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat Prodi. MKP karena di Dukuh Penaban belum terbentuk tata kelola yang baik dalam hal pengembangan desa wisata. Masih terdapat beberapa kondisi masyarakat lokal yang belum siap memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang, karena belum adanya system pengelolaan yang jelas. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, dengan peserta seluruh pemangku kepentingan di Desa Wisata Dukuh Penaban. Output dari kegiatan ini adalah: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem tata kelola desa wisata, terbentuknya sistem tata kelola pariwisata yang dikelola oleh suatu lembaga badan pengelola profesional di wilayah Desa Adat Dukuh Penaban yang mengakomodir aspirasi masyarakat lokal, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, sehingga*

menjadikan Dukuh Penaban sebagai destinasi favorit di Kabupaten Karangasem. Dengan kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa meningkatnya SDM dari Desa Wisata Dukuh Penaban yang terampil dan mandiri dalam mengelola potensi wisata di daerahnya secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** desa wisata, tata kelola, Dukuh Penaban

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (*community based tourism*) adalah sebuah konsep yang menekankan masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal merupakan paradigma yang sangat penting dalam kerangka pengembangan dan atau pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata. Tiga kegiatan pariwisata yang mendukung konsep CBT yaitu penjelajah (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural tourism*), dan ekowisata (*ecotourism*).

Konsep yang digunakan dalam CBT sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan, dimana masyarakat diberdayakan terlebih dahulu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri dan dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (*self help*), sehingga masyarakat mampu mengelola desanya sendiri (Listiandre, dkk., 2021).

Wujud dari konsep *community based tourism* (CBT) adalah dikembangkannya desa-desa wisata, dimana masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusianya. Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah dengan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut (Susianti, dkk., 2022).

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, dengan sekelompok kecil wisatawan yang tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Sedangkan Nuryanti (2012) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik

Salah satu desa wisata yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem adalah Desa Wisata Dukuh Penaban, yang mulai dikembangkan sejak tahun 2017 dengan menawarkan atraksi berupa pemandangan yang indah dan keunikan budaya turun temurun yang masih terjaga. Untuk menikmati keindahan alam, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Di tempat ini, wisatawan bisa berpetualang dengan melintasi jalur trekking alami berupa sawah yang luas, dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke puncak Bukit Jongkok. Dari atas bukit ini, wisatawan bisa menyaksikan secara langsung pantai serta laut yang ada di sekitar Karangasem, dan juga pemandangan Gunung Agung. Selain itu wisatawan dapat berkunjung ke Museum Lontar, dimana wisatawan dapat mempelajari seni membaca lontar yang merupakan salah satu tradisi di masa lalu. Wisatawan juga dapat belajar mengenai cara membuat surat lontar.

Sebagai aktivitas wisata kuliner yang unik di Desa Wisata Dukuh Penaban, wisatawan bisa mencicipi lawar don jepun, yang dibuat dengan bahan utama daun kamboja. Lawar don jepun ini menjadi kuliner unik di Desa Dukuh Penaban tidak hanya karena kelezatannya, tetapi juga mempunyai nilai sejarah penting. Eksistensinya memiliki hubungan penting dengan pembangunan Pura Puseh Dukuh Penaban yang berlangsung pada tahun 1658. Pada proses pembangunannya itu, warga desa berbondong-bondong melakukan pembangunan pura secara gotong royong. Mereka pun turut membawa menu berupa nasi serta lawar don jepun.

Desa Dukuh Penaban merupakan sebuah desa wisata yang pengembangannya baru dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengukuhan desa ini sebagai desa wisata juga baru dilakukan pada

tahun 2017. Pada acara pengukuhan tersebut, masyarakat setempat menampilkan tarian sakral yang disebut dengan Tari Kupu-Kupu Kuning. Tarian ini merupakan salah satu jenis tari tradisional Bali yang memiliki makna penting. Biasanya pementasan Tari Kupu-Kupu Kuning dilakukan oleh para pria dan dipentaskan pada piodalan. Gerakan tarian juga begitu beda dibandingkan dengan tarian lain, menggunakan pakaian serba kuning, kipas, serta keris.

Langkah Desa Adat Dukuh Penaban Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang dengan inovasinya sendiri telah membangun desanya sendiri sebagai desa wisata ini, pantas diapresiasi. Berbagai penghargaan telah mereka raih, diantaranya adalah Juara Pokdarwis tingkat provinsi Bali 2019, Juara Lomba Silpakara Nugraha 2019, memperoleh Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2019, Juara Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional Sustainable Tourism Award, Pokdarwis kategori Mandiri 2019, memperoleh Penghargaan MURI sebagai Desa Adat pertama yg membangun Museum Pustaka Lontar 2020, dan Apresiasi Markplus Tourism, kategori Entrepreneurial Destination Award tahun 2021.

Meskipun telah dibangun dan melakukan aktivitas pariwisata sejak tahun 2017, namun pengakuan sebagai Desa Wisata bagi Desa Adat Dukuh Penaban baru dikukuhkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Bupati Karangasem Nomor 205/HK/2022 tentang Penetapan 6 Desa Wisata di Kabupaten Karangasem, yang salah satunya adalah Desa Adat Dukuh Penaban.

Desa Wisata Dukuh Penaban ini dikelola oleh Desa Adat Dukuh Penaban yang dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) setempat. Ketua POKDARWIS, Bapak I Nengah Sudana, yang dibantu oleh anggota kelompok pokdarwis lainnya, berperan sangat besar dalam pengembangan pariwisata di Dukuh Penaban. Semangat POKDARWIS Dukuh Penaban sangatlah tinggi dalam mendorong masyarakat setempat untuk bekerjasama atas pengembangan desa wisata, dengan cara mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan tetap menjaga keasrian alam Dukuh Penaban, dan ikut terlibat dalam industri pariwisata, guna meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjadi *guide*, berwirausaha seperti membuat warung makan, menjadikan rumahnya sebagai *guest house*, dan lain lain.

Adapun alasan kuat mengapa Desa Adat Dukuh Penaban dipilih sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat Program Studi MKP, dikarenakan saat ini di Dukuh Penaban belum terbentuk tata kelola yang baik dalam hal pengembangan desa wisata. Masih terdapat beberapa kondisi masyarakat lokal yang belum siap memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang dikarenakan belum adanya system pengelolaan yang jelas.

Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan bahwa tata kelola desa wisata merupakan cara untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan maka pengelola wajib melakukan manajemen sumberdaya yang efektif. Manajemen sumberdaya digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan. Longjit dan Pearce (2013) membagi tata kelola desa wisata ke dalam tiga bagian yakni tujuan, aktifitas atau kegiatan dan struktur desa wisata. Tujuan diartikan sebagai sasaran atau target yang akan dicapai suatu desa dalam menjalankan suatu program pariwisata. Sasaran ini dituangkan dalam bentuk tujuan (*goals*) yang hendak dicapai pada periode tertentu. Sedangkan aktifitas dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tata kelola desa wisata. Umumnya, tata kelola desa wisata senantiasa menitikberatkan pada pentingnya mendorong masyarakat mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata serta pelestarian sumber-sumber pariwisata yang dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, pengelola dan tokoh masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban mengaku belum siap dengan tata kelola desanya sebagai desa wisata. Disisi lain, kondisi pasca pandemic Covid-19 merupakan momentum untuk menyiapkan segala hal terkait pengembangan desa wisata. Kondisi ini pun menuntut setiap desa wisata agar mampu memberikan pelayanan berdasarkan protokol kesehatan. Sehingga, ketika nanti desa wisata telah siap, desa wisata Dukuh Penaban dapat menjadi pilihan untuk dikunjungi wisatawan dan mampu memperoleh manfaat yang positif bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan secara terus menerus terutama dari pihak akademisi (Prodi. MKP) guna membentuk keterampilan masyarakat agar mandiri dalam mengelola potensi desa wisata secara

berkelanjutan.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan Tahap pertama dari serangkaian kegiatan pendampingan bagi *stakeholder* pariwisata di wilayah Dukuh Penaban. yang berbentuk pelatihan dengan judul “Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem”. Kegiatan pelatihan ini memfokuskan pengelolaan sebuah desa wisata dan mendengarkan pemaparan serta rencana pengelolaan Desa Wisata Dukuh Penaban, yang dievaluasi oleh pembahas, apa yang perlu dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan desa wisata dan apa yang dipandang perlu untuk diperbaiki pada pengelolaan saat ini.

Materi pertama diberikan oleh narasumber dari Poltekpar Bali, Ni Made Tirtawati, S.Si.,M.Par. dengan tema Potensi Desa Wisata. Materi kedua dengan tema Best Practise Desa Wisata Munggu, disampaikan oleh narasumber Ketua Pokdarwis Desa Wisata Munggu, I Putu Suada. Sedangkan materi ketiga disampaikan oleh narasumber dari Poltekpar Bali Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si., mengenai Tata Kelola Desa Wisata.

Kegiatan ini dilaksanakan di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban, pada hari Jum’at dan Sabtu, 17 dan 18 September 2022, dan diikuti oleh Perbekel Dukuh Penaban, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Kelian Subak, Pokdarwis, anggota PKK, dan Pelaku Wisata seperti pemilik akomodasi, pemilik restoran, pemilik usaha transportasi lokal di Dukuh Penaban, yang berjumlah 30 orang.

Adapun *output* yang diharapkan setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan antara lain: 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem tata kelola desa wisata. 2) Terbentuknya sistem tata kelola pariwisata yang dikelola oleh suatu lembaga badan pengelola profesional di wilayah Desa Adat Dukuh Penaban yang mengakomodir aspirasi masyarakat lokal, dan 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan sehingga menjadikan Dukuh Penaban sebagai destinasi favorit di Kabupaten Karangasem.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Menggali Potensi Desa Wisata

Kegiatan pelatihan yang pertama difasilitasi oleh Ni Made Tirtawati, S.Si., M.Par dengan materi Menggali Potensi Desa Wisata. Disampaikan bahwa saat ini tren berwisata telah mengalami pergeseran. Dari yang semula *massive tourism*, telah bergeser lebih kearah *special interest tourism*. Dari kunjungan yang singkat untuk sekedar melihat dan berfoto saja, menjadi lebih lama dan bersifat petualangan. Dari yang hanya mengunjungi destinasi yang terkenal dan strategis saja, saat ini wisatawan lebih memilih eksplorasi tradisi, budaya dan interaksi keunikan lokal. Dari yang bersifat degradasi dan bahkan destruktif terhadap lingkungan, menjadi bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga kearifan lokal. Akibatnya jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan menjadi lebih banyak. Dari yang hanya sekedar membayar tiket dan parkir, menjadi pembelian paket wisata.

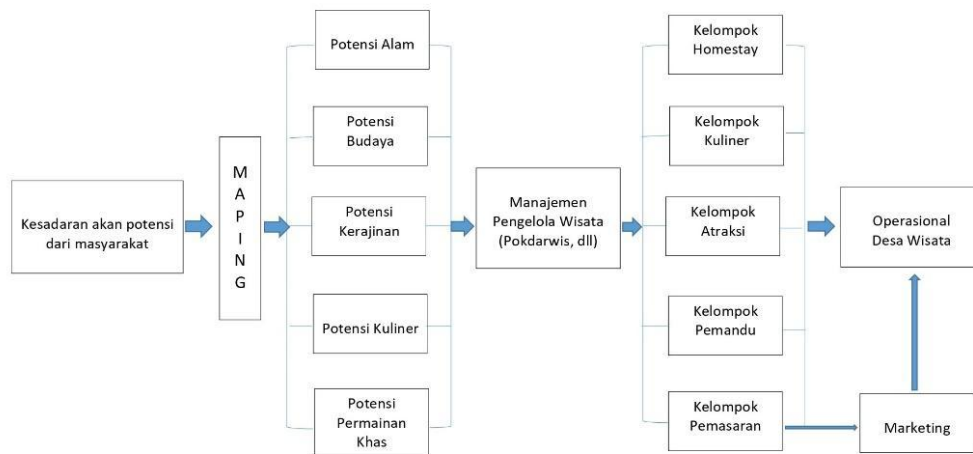
Disampaikan pula bahwa yang menjadi motivasi wisatawan “Jaman Now” adalah adanya *Something to do* (aktivitas bagi wisatawan); Mereka ingin dekat dengan alam/ tradisi lokal; Mereka ingin merasakan gaya dan irama hidup yang berbeda dengan keseharian; Ingin sesuatu yang baru, unik, dan inovatif; Adanya kesan bebas dan leluasa bereksplorasi dengan alam dan dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari permintaan tersebut. Desa wisata menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Desa Wisata adalah untuk mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternative, menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat, serta untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk (Soetarso Priasukmana, 2001).



Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2011), syarat pembangunan Desa Wisata adalah (1) Memiliki potensi daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, sosial, dan budaya), (2) Memiliki dukungan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) lokal, (3) Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana berupa komunikasi akomodasi, serta aksesibilitas yang baik, (4) Peluang akses pasar, (5) Partisipasi aktif dan komitmen masyarakat lokal, (6) Secara lingkungan dapat berkelanjutan dan mengutamakan kearifan lokal.



Gambar 1: Bagan Proses Pembentukan Desa Wisata  
[Sumber: Ni Made Tirtawati, 2022]

Dari bagan di atas bisa dilihat bahwa langkah pertama dalam pengembangan Desa Wisata adalah menggali/ mengidentifikasi potensi desa. Pada pelatihan ini peserta juga diajak untuk mengidentifikasi dan membuat list potensi wisata di Desa Dukuh Penaban, dengan identifikasi 4A (Atraksi; Amenitas; Aksesibilitas dan Ancillary/ Kelembagaan). Kegiatan ini juga mengungkap *Something to See* (sesuatu yang bisa dilihat), *Something to Do* (sesuatu yang bisa dilakukan), *Something to Buy* (sesuatu yang bisa dibeli) dan *Something to Learn* (sesuatu yang bisa dipelajari), di Desa Wisata Dukuh Penaban.

Identifikasi juga dilakukan pada Sumber Daya Pariwisata, yang meliputi Sumber Daya Alam (flora & fauna, topografi alam, ekosistem dll), Sumber Daya Budaya (tarian, kerajinan, permainan tradisional, kuliner dll ) dan Sumber Daya Manusia (Modal sosial), dengan teknik SWOT, guna menggali *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang ada di Desa Wisata Dukuh Penaban.

### 3.2 Studi Kasus Tata Kelola Desa Wisata Munggu

Materi kedua dengan tema Best Practise Desa Wisata Munggu, disampaikan oleh narasumber Ketua Pokdarwis Desa Wisata Munggu, I Putu Suada, yang membagikan pengalamannya tentang pengelolaan Desa Wisata Munggu. Desa Wisata Munggu merupakan Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sejak tahun 2010, berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2010 dan telah diperbarui menjadi Peraturan Bupati Badung No 22 Tahun 2021. Desa ini terletak di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan berada sekitar 15 km sebelah barat Kota Denpasar, serta dapat ditempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Desa Wisata Munggu terdiri dari 13 Banjar Dinas, 3 Desa Adat, 17 Banjar Adat dan 2 Lembaga Pesubakan.

Dengan mengandalkan daya tarik keeksotisan budaya dan keindahan alam serta lokasi yang strategis yaitu di jalur utama Ubud – Tanah Lot dan Denpasar – Tanah Lot, desa wisata Munggu menawarkan potensi wisata yang terdiri dari : 1) Wisata Budaya yakni tradisi Mekotek, 2) Wisata Alam berupa Pantai Munggu dengan atraksinya Bebekan di muara, *surfing lesson*, *volley* pantai, berkuda, dan wisata penyembuhan dengan pasir abu-abu yang dipercaya bisa menyembuhkan

rematik. Ada juga kawasan hijau persawahan untuk *tracking* dan *cycling*, serta Sungai Penet dengan atraksi *Tubing*.

Dikemukakan bahwa pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata, yang berperan sebagai regulator dan sebagai kontroler. (Perencanaan, pemantauan, pengendalian, perizinan, alokasi keuangan, UUD). Sedangkan tiga kelompok dalam kelembagaan Desa Wisata yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS): Kelompok ini dibentuk atas kesepakatan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa, dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Adanya kelompok ini berperan dalam mengelola hal-hal kepariwisataan seperti mewujudkan konsep Sapta Pesona pada destinasi wisata. Sehingga Pokdarwis dapat digolongkan sebagai pelaku wisata dalam pengelolaan industri pariwisata
- 2) Koperasi: Desa Wisata juga dapat dikelola oleh Koperasi yang setidaknya memiliki 20 orang anggota yang pembentukannya dikukuhkan oleh Kepala Dinas Koperasi setempat. Dalam hal ini koperasi menjadi badan hukum yang berkewajiban dan bertanggung jawab mengelola kegiatan dan mendapat keuntungan dari pariwisata.
- 3) Badan Usaha (BUMDES/BUMDAT): BUMDES merupakan badan hukum yang resmi dibentuk oleh pemerintah Desa, sedangkan BUMDAT dibentuk melalui perareman Desa Adat. Kolaborasi dengan ketiga Kelembagaan desa wisata tersebut telah menghasilkan MUSDES (Musyawarah Desa), PERDES (Peraturan Desa), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), PERDES Desa Wisata, Perjanjian Kerja Sama antar Kelembagaan, dan Perareman Desa Adat.

Gambar 2: Pemberian Materi oleh I Putu Suada



(Sumber: Laporan Kegiatan, 2022)

### 3.3 Tata Kelola Desa Wisata

Kunci keberhasilan pengembangan suatu desa wisata terletak pada suasana perdesaan yang masih sangat kental, penduduk yang *welcome* (ramah, tulus, jujur dan dapat dipercaya), *stakeholders* atau para pelaku yang profesional, Sapta Pesona yang terimplementasi dengan baik, kesehatan dan pendidikan masyarakat yang baik, serta perekonomian masyarakat lokal yang meningkat. Desa wisata akan dikatakan lengkap dan unggul apabila wisatawan dapat menikmati kehidupan keseharian masyarakat lokal, dapat saling belajar tentang kehidupan, dapat memberikan gairah dan energi baru, dapat bergaul dan berbaur dengan rakyat, dan mereka merindukan suasana itu, ingin kembali lagi, dan menceritakan suasana tersebut kepada saudara ataupun sahabat mereka di tempat asalnya.

Tahap-tahap dalam pembentukan dan pengelolaan sebuah Desa Wisata, dapat dirumuskan

seperti bagan di bawah ini:

Gambar 3: Aktivitas Pembentukan dan Pengelolaan Desa Wisata



(Sumber: I Wayan Mertha, 2022)

Berbicara mengenai pengelolaan desa wisata, tidak akan terlepas dari siapa yang terlibat dalam pengelolaan, apa peran masing-masing pihak dalam pengelolaan, bagaimana mengkoordinasikan semua kepentingan yang ada, bagaimana pembagian hasil antar pihak yang terlibat, dan bagaimana membangun model komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan.

Adapun implementasi dari pengelolaan sebuah Desa Wisata mempunyai persyaratan, yakni: 1) Pelibatan seluruh *Stakeholders*, 2) Memperkuat Kepemimpinan (*Leadership*), 3) Terus menerus dan berkelanjutan (*Continuous Sustainability*) dan 4) Mekanisme Audit, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja.

Sedangkan yang menjadi Indikator dalam keberhasilan pengelolaan Desa Wisata adalah:

- 1) Semakin tertatanya lingkungan desa Wisata
- 2) Meningkatnya jumlah wisatawan yang disertai dengan semakin lamanya tinggal, semakin banyaknya pengeluaran, dan adanya kunjungan ulang
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
- 4) Kepuasan wisatawan dan juga kepuasan masyarakat

Untuk itu, dalam pengelolaan Desa Wisata diperlukan langkah-langkah strategis yang berupa Penguatan *Stakeholder*, Penguatan Kelembagaan/Pengelolaan, Penguatan Komunikasi dan Pemasaran, Penguatan Dampak (Ekologis, Sosial-Budaya, Ekonomis), Penguatan Bisnis, Penguatan SDM, Penguatan jejaring dan konektivitas dan Penguatan Pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu aspek keberhasilan pengelolaan suatu desa Wisata, yang identik dengan pemberdayaan SDM masyarakat lokal, khususnya peningkatan peran wanita di pedesaan. Dalam pelaksanaan tugas di desa wisata, peran wanita benar – benar ditunjukkan lewat tugas dalam melayani para tamu yang menginap. Dengan adanya tamu yang menginap di desa, akan membuat kegiatan wanita lebih padat dari biasanya. Dalam melayani para tamu yang menginap, ibu-ibu di desa wisata harus dapat melaksanakan dengan baik tugasnya sesuai dengan kegiatan tamu selama mereka menginap di desa wisata, Makan pagi, makan siang, *snack* sore dan makan malam serta pasca makan malam, seperti penyediaan minuman dan makanan kecil bagi tamu yang ingin memesan, membersihkan serta menata kamar tidur beserta perlengkapannya, mencuci pakaian para tamu yang kotor, berbelanja dan lain sebagainya. Masyarakat digugah kesadarannya, untuk rela menjadikan rumah atau sebagian kamar mereka, sebagai tempat tinggal para tamu untuk sementara (*home stay*) dan menjadikan tamu-tamu yang menginap sebagai teman-teman mereka.

Tidak hanya itu, masyarakat desa hendaknya dipersiapkan (dilatih) pula di bidang pariwisata seperti tata cara menerima tamu, memasak dan menyajikan makanan dan minuman, menata kamar tamu, kebersihan dan kesehatan, pelayanan prima dan kemampuan bercerita (interpretasi).

Keberhasilan pengelolaan desa wisata akan banyak memberikan manfaat: Bagi komunitas Desa Wisata sendiri, hal tersebut merupakan diserifikasi pekerjaan dan pendapatan, konservasi lingkungan, peningkatan produktivitas usaha ekonomi, peningkatan spirit kewirausahaan, kebanggaan sebagai destinasi wisata, pengayaan wawasan/ pembelajaran, serta promosi produk komunitas; Bagi wisatawan, akan memberikan kepuasan terhadap pengalaman unik dan kenangan yang tak terlupakan, pada saat terlibat dalam kegiatan sehari-hari (*live in*) dengan komunitas; Bagi industry, akan menghasilkan *competitive product* yang bernilai tinggi, harga jasa yang eksklusif, mendatangkan repeater guest, dan mendapatkan loyalitas konsumen; Sedangkan bagi pemerintah, manfaat keberhasilan pengelolaan Desa Wisata ini antara lain adanya pemasukan dari pajak dan retribusi, efektivitas pelestarian lingkungan, perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya daerah.

Demikian materi pelatihan yang disampaikan oleh Dr. I Wayan Mertha, SE. M.Si.. Pada pelatihan ini peserta juga diajak untuk berdiskusi terkait kondisi pengelolaan dan kegiatan pariwisata di Desa Dukuh Penaban.



Gambar 4: Peserta Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata Dukuh Penaban (Sumber: Laporan Kegiatan, 2022)

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pelatihan ini adalah kegiatan pendampingan tahap pertama, dari tiga tahapan yang direncanakan. Selanjutnya akan diadakan kembali pendampingan tahap kedua, yakni berupa pelatihan terkait produk desa wisata. Pada tahap ini akan dihadirkan fasilitator di bidangnya, yaitu dosen Prodi. Manajemen Kepariwisata. Pendampingan akan dilaksanakan sampai pada tahap evaluasi. Sebagai Tahapan terakhir sebuah program, evaluasi merupakan hal yang wajib dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari kegiatan pelatihan tersebut. Fasilitator akan mengajak masyarakat untuk mengevaluasi secara bersama-sama tentang sistem tata kelola dan kesiapan SDM nya. Dari evaluasi ini, masyarakat akan mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dan apa yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya. Tahapan ini mengharapkan masyarakat mampu lebih mandiri dalam mengelola pariwisata di wilayahnya.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pendampingan Tata Kelola Desa Wisata Dukuh Penaban di Kabupaten Karangasem” ini diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pariwisata pada umumnya dan Desa Wisata Dukuh Penaban pada khususnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Baihaqi. (2019). *Desa Wisata Dukuh Penaban, Pilihan Tempat Liburan Baru dengan Aktivitas*

- Unik. Kintamani ID. Retrieve from <https://www.kintamani.id/desa-wisata-dukuh-penaban-pilihan-tempat-liburan-baru-dengan-aktivitas-unik/>
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach..* New York : Van Nostrand Reinhold.
- Jadesta (2022), *Desa Wisata Duku Penaban*, Retrieved from [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dukuh\\_penaban](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dukuh_penaban)
- Latip, N. A., Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Marzuki, A., & Umar, M. U. (2018). Indigenous residents' perceptions towards tourism development: a case of Sabah, Malaysia. *Journal of Place Management and Development*. 11 (4). 391 – 410. <http://doi.org/10.1108/jpmd-09-2017-0086>
- Lekaota, L. (2015). The importance of rural communities' participation in the management of tourism management. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. 7 (5). 453 – 462. <https://doi.org/10.1108/whatt-06-2015-0029>
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*. 5(3). 248 – 262. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-08-2014-0027>
- Listiandre, H.K, dkk. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Berbasis CHSE di Desa Bakas Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*. 1 (2). 106 – 114. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v1i2.581>
- Longjit, C. & D. Pearce. (2013). Managing a Mature Coastal Destination: Pattaya Thailand. *Semantic Scholar*. <https://doi.org/10.1016/J.JDMM.2013.05.002>
- Mertha, I Wayan. (2022). *Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Adat*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata Duku Penaban Kabupaten Karangasem. Pengabdian kepada Masyarakat Prodi. Manajemen Kepariwisata Poltekpar Bali.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges*, Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pitana, I G., & Diarta, I K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suharto (2006). *Buku panduan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Berbasis Pendampingan*. Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.
- Susianti, H.W. dkk. (2022). Penguatan Storytelling Produk Wisata Bakas Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*. 2 (1). 54 - 61. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v2i1.766>
- Tim Prodi. Manajemen Kepariwisata (2022). *Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Duku Penaban di Kabupaten Karangasem*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekpar Bali: Laporan Kegiatan PKM.
- Tirtawati, N. M. 2022. *Menggali Potensi Sumberdaya Pariwisata*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata Duku Penaban Kabupaten Karangasem. Pengabdian kepada Masyarakat Prodi. Manajemen Kepariwisata Poltekpar Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Daftar Pustaka merujuk pada aturan penulisan dari APA (<https://apastyle.apa.org>). Disarankan menggunakan *Reference Manager*.

## **LAMPIRAN**

- 1. SK PkM**
- 2. REALISASI ANGGARAN**
- 3. Surat Penugasan Panitia (Dosen, Tendik dan Mahasiswa)**
- 4. Surat Pemberitahuan Kegiatan dan Permohonan Peserta**
- 5. Laporan Perjadin e-office**
- 6. Daftar Hadir Peserta dan Panitia (Fotocopy)**
- 7. Daftar Hadir Narasumber dan Sertifikat Narasumber**
- 8. Dokumentasi Kegiatan Perhari**



## REALISASI ANGGARAN.

### Realisasi Anggaran

Berisi keterangan alat dan bahan, jumlah, dan harga yang sesuai nota realisasi anggaran.

Berikut terlampir format Realisasi Anggaran PkM.

Contoh Realisasi Anggaran

Skema Program Studi

Panitia : 12 (Dosen dan Tendik) serta 3 Mahasiswa

Lokus : Kab. Gianyar

	<i>Pelaksanaan Pengabdian Kelompok</i>					<b>55.935.000</b>
521211	<u>Belanja Bahan</u>					<b>18.350.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Konsumsi peserta [30 ORG x 2 KL x 1 KEG]	60	OK	48.000		2.880.000
	- Snack peserta [30 ORG x 3 KL x 1 KEG]	90	OK	21.000		1.890.000
	- Konsumsi panitia [15 ORG x 3 KL x 1 KEG]	45	OK	48.000		2.160.000
	- Snack panitia [15 ORG x 3 KL x 1 KEG]	45	OK	21.000		945.000
	- Kaos [45 ORG x 1 KL x 1 KEG]	45	PCS	125.000		5.625.000
	- Seminar Kit [30 BH x 1 KL x 1 KEG]	30	BH	75.000		2.250.000
	- Penggandaan Laporan [5 LAP x 1 KL x 1 KEG]	5	LAP	100.000		500.000
	- Spanduk [2 BH x 1 KL x 1 KEG]	2	BH	300.000		600.000
	- Publikasi [1 PKT x 1 KL x 1 KEG]	1	PKT	1.500.000		1.500.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>					<b>4.000.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Sewa Gedung [1 UNIT x 2 HR x 1 KEG]	2	HR	2.000.000		4.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>					<b>2.400.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	- Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2	OJ	1.200.000		2.400.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					<b>31.185.000</b>
	(KPPN.037-Denpasar )					
	> Penjajagan Gianyar					<b>2.560.000</b>
	- Uang Harian [4 ORG x 1 HR x 1 KEG]	4	OH	190.000		760.000
	- Transport [4 ORG x 2 KL x 1 KEG]	8	OK	225.000		1.800.000
	> Paket Perjalanan Dinas Pelaksanaan					
	>> Bali					<b>28.625.000</b>
	- Akomodasi [8 KMR x 2 MLM x 1 KEG]	16	MLM	650.000		10.400.000
	- Uang Harian Panitia Hari 1 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	190.000		2.280.000
	- Uang Harian Panitia Hari 2 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	160.000		1.920.000
	- Uang Harian Panitia Hari 3 [12 ORG x 1 HR x 1	12	OH	115.000		1.380.000
	- Transportasi Panitia Gianyar PP [12 ORG x 2 KL x 1 KEG]	24	OK	225.000		5.400.000
	- Uang Harian Panitia Mahasiswa Hari 1 [3 ORG x 1 HR x 1 KEG]	3	OH	190.000		570.000
	- Transportasi Panitia Mahasiswa Gianyar PP [3 ORG x 2 KL x 1 KEG]	6	OK	112.500		675.000
	- Transport Peserta [30 ORG x 2 HR x 1 KEG]	60	OK	100.000		6.000.000